



JurnalHalal

HALAL IS MY LIFE

37

LPPOM PROFESSIONAL
TRUSTWORTHY

LPPOM CONNECT 2026:

REFLEKSI DAN PENGUATAN KINERJA LPPOM
DALAM MENJAGA AMANAH HALAL

MENUJU TATA KELOLA
INDUSTRI BERKELANJUTAN:
INTEGRASI HALAL, MUTU,
DAN ETIKA

PETA JALAN KEHIDUPAN:
TARGET YANG DITULIS,
TAKDIR YANG DIMUDAHKAN

MELALUI CETAK BIRU,
BANK INDONESIA
DORONG PENGUATAN EKOSISTEM
HALAL NASIONAL

SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN: KEBUTUHAN ATAU SEKADAR TREND?



ISSN 0852 - 494715

Sumber Ayu 3.5

SABUN & AIR SAJA MEMANG CUKUP?

Gunakan Sumber Ayu dengan pH 3,5 yang
Optimal Merawat Area Kewanitaan



pH 3.5
in average



95% Ahli Setuju

pH 3,5 Cocok Untuk Area Kewanitaan*



*survey Hello Sehat ke 60 Obgyn di Indonesia (2025)



Skala pH Meter

pH 2 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 pH 12



Indofood
ice cream

달고나
커피



DALGONA COFFEE

Es Susu Rasa Dalgona Coffee
Dalgona Coffee Flavoured Ice Milk

BARU!



대박



GOGUMA

Es Susu Rasa Goguma
Goguma Flavoured Ice Milk

CHOC' ROCKS
BAR

필치



PEACH MOCHI

Es Susu Rasa Buah Persik
Peach Flavoured Ice Milk

오모



CHOCO MINT

Es Susu Rasa Cokelat Mint
Mint Chocolate Flavoured Ice Milk



PROSPEK CERAH INDUSTRI HALAL INDONESIA 2026

Awal tahun 2026 merupakan momentum emas bagi bangkitnya industri halal di Indonesia. Ada sejumlah alasan yang mendasari optimisme tersebut. Pertama, mulai 18 Oktober 2026 seluruh produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan produk kosmetika yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Kedua, pertumbuhan konsumsi produk halal tahun 2026 diperkirakan mencapai 5,88% atau mencapai USD259,8 miliar, dengan makanan-minuman halal sebagai tulang punggung (73,2%). Data tersebut sesuai dengan proyeksi ekonomi yang disusun oleh *Office of Chief Economist* (Kantor Ekonom) PT Bank Syariah Indonesia (BSI), dalam acara BSI Sharia Economic Outlook 2026 bertema "Indonesia 2026: Resilient, Bold, and Promising", Kamis, 4 Desember 2025. Terutama menyoroti semakin besarnya peran produk halal dalam konsumsi masyarakat, yakni menyumbang 30,8 persen dari total konsumsi rumah tangga.

Faktor ketiga adalah tren global. Industri halal telah memasuki fase yang semakin matang dan strategis, yang salah satunya ditandai bahwa halal tidak lagi dipandang sekadar simbol religius, namun menjadi standar kualitas global. Bagi Indonesia yang telah lama berkiprah di ranah halal, sertifikasi halal tentu semakin memperkuat posisi produk Indonesia di pasar internasional, terutama negara muslim mayoritas. Dukungan pemerintah yang menyediakan anggaran sebesar Rp2,1 Triliun untuk sertifikasi gratis selama setahun ke depan juga menjadi faktor positif.

Bagaimana kita mengantisipasi perkembangan tersebut? Apa yang sudah dan akan dilakukan? Bagaimana strategi para pelaku usaha? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, *Jurnal Halal* edisi kali ini membahas tuntas dalam *Indonesia Halal Outlook 2026* yang terbagai dalam berbagai rubrik. Selamat membaca. (Redaksi).

ISSN 0852 4947

REKOMENDASI MUI NO. 4-456/MUI/VIII/94,

1 AGUSTUS 1994

REKOMENDASI DIRJEN BINMAS ISLAM DEPAG

NO. D/5/HMO2. 1/7/10/1994

PENERBIT

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM)

PEMIMPIN REDAKSI
FARID MAHMUD, SH

REDAKTUR AHLI

PROF. DR. HJ. SEDARNAWATI YASNI, M.SC (KETUA)
IR. H. HENDRA UTAMA, MM

KONTRIBUTOR AHLI

PROF. DR. KHASWAR SYAMSU, M.SC (KETUA)
PROF. DR. HJ. PURWANTININGSIH M.SI
DR. IR. HENNY NURAINI, M.SI
PROF. DR. IR. FERRY KUSNANDAR, M.SC
DR. IR. SRI MULJANI, M.SC
DR. PRIYO WAHYUDI, M.SI
DR. MARDIAH, M.SI
FADILA, S.TP
MUHAMMAD ZULKIFLY, S.SI
RINA MAULIDIYAH, S.TP
NAOMI CARISSA INTAQTA, S.TP
DEWY SARTIKA, S.IP

PELAKSANA REDAKSI

FARID MAHMUD, SH (KETUA)
IR. HENDRA UTAMA, MM

SEKRETARIS REDAKSI

YUNITA NURROHMANI

PENERBIT, SIRKULASI DAN PEMASARAN
PT. AMANAH PRIMA ABADI

PEMIMPIN PERUSAHAAN:
AGUNG HARIYONO, SS

BAGIAN PEMASARAN DAN IKLAN:
ADI BADIO

KONTRIBUTOR REDAKSI:
SYAIFUL FALLAH

BAGIAN UMUM:
FIRMANSYAH

DESAIN/LAYOUT
MULYONO

E-MAIL

CORCOMLPPOM@HALALMUI.ORG
PT.AMANAPRIMAABADI@GMAIL.COM

WEBSITE

WWW. HALALMUI.ORG

REDAKSI/SIRKULASI

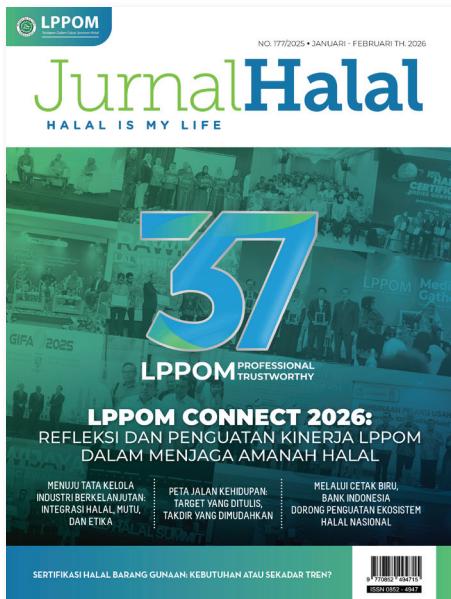
GEDUNG GLOBAL HALAL CENTRE
JL. PEMUDA NO. 5 KOTA BOGOR
TELP. +62-251-8358748
Call Center Halo LPPOM:14056
Email: customercare@halalmui.org
amanahprimaabadi@gmail.com
Whatsapp: 08111148696

REDAKSI MENERIMA KIRIMAN ARTIKEL ILMIAH POPULER.

ARTIKEL BISA DIKIRIM MELALUI E-MAIL ATAU FAXIMILI.

PANJANG TULISAN MAKSIMAL 3000 KARAKTER.

DILENGKAPI CV DAN FOTO (300 DPI/1 MB)



DAFTAR ISI

06 KONSULTASI

Mencari Peluang Bisnis Halal

08 FOKUS

- Indonesia Halal Outlook 2026: Perkuat UMKM dan Teknologi Halal
- "Ke Depan, Industri Halal Global Bergerak Menuju Arah yang Lebih Bertanggung Jawab"
- "Keberlanjutan Menjadi Fokus Utama Konsumen Muda"

16 WAWANCARA KHUSUS

Melalui Cetak Biru, Bank Indonesia Dorong Penguatan Ekosistem Halal Nasional

20 LIPUTAN KHUSUS

- LPPOM Connect 2026: Refleksi dan Penguatan Kinerja LPPOM dalam Menjaga Amanah Halal
- 1.493 Pendaftar, Tiga Juara Lahir! Gen Halal Championship Cetak Generasi Sadar Halal

28 LIFESTYLE

Tren Mode Fashion Muslim 2026: Mengusung Kesopanan dan Keanggunan

32 TAUSIYAH

Peta Jalan Kehidupan: Target yang Ditulis, Takdir yang Dimudahkan

34 BEDAH PRODUK

Sertifikasi Halal Barang Gunaan: Kebutuhan atau Sekadar Tren?

36 RISTEK

Menuju Tata Kelola Industri Berkelanjutan: Integrasi Halal, Mutu, dan Etika

40 TOKOH

Pemikiran dan Kepeloporan Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin: Dari Ekonomi Syariah Hingga Sistem Sertifikasi Halal

43 RAGAM BERITA

- Halal Menjadi Jembatan Kesejahteraan di Ujung Negeri
- LPPOM Meraih Apresiasi Mitra Usaha Mikro Kementerian UMKM
- LPPOM Kirim 100 Tangki Air Bersih untuk Korban Bencana Sumatera



Jurnal Halal dapat diunduh di Gramedia Digital:
<https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/jurnal-halal>

Untuk berlangganan dapat menghubungi:

Jurnal Halal
HALAL IS MY LIFE

Gedung Global Halal Centre
Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor | Gedung MUI Pusat Lt. 3
Jl. Proklamasi No. 51
Menteng Jakarta Pusat

Call Center Halo LPPOM: 14056
Email: customercare@halalmui.org, amanahprimaabadi@gmail.com
WhatsApp: 08111148696



MENCARI PELUANG BISNIS HALAL



Raafqi Ranasasmita, M.Biomed

Corporate Affairs &
Audit Services General Manager LPPOM

PERTANYAAN:

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan harapan agar dapat menjadi pengusaha meskipun kecil-kecilan, saya bermaksud merintis bisnis di bidang produk halal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai peluang bisnis tersebut, saya mohon para ahli di LPPOM dapat menjelaskan, bidang apa saja yang memiliki prospek bagus? Apa yang harus saya persiapkan untuk mulai usaha di bidang tersebut?

Demikian pertanyaan ini saya sampaikan. Terima kasih atas tanggapan dan penjelasannya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dimas Prayoga
Gresik, Jawa Timur

JAWABAN:

Waalaikumsalam wr. wb.

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Bapak Dimas. Pertanyaan tentang peluang bisnis apa yang layak Anda masuki di tahun 2026, mungkin akan lebih tepat dijelaskan oleh konsultan bisnis atau para ahli di bidang ini. Namun, karena pertanyaan Bapak ada kaitannya dengan produk halal, maka saya mencoba menjelaskan dari aspek halalnya, serta sedikit ulasan mengenai sektor usaha yang mungkin menarik untuk Anda tekuni.

Seperti kita ketahui, mulai Oktober 2026 semua produk makanan, minuman, kosmetika, obat, dan barang gunaan wajib bersertifikat halal. Artinya, bisnis apapun yang akan Anda jalankan, selagi masih berkaitan dengan produk yang disebutkan di atas, wajib melengkapi diri dengan sertifikat halal.

Tuntutan regulasi tersebut tentu menjadi peluang tersendiri bagi para pelaku usaha di bidang halal. Sebab tuntutan konsumen akan produk halal memang sangat tinggi. Itu pula yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah untuk membuat aturan wajib sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia.

Selain itu, banyak pengamat dan pelaku usaha memperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang, konsumsi produk halal diproyeksikan terus tumbuh. Oleh karena itu, keputusan untuk memulai bisnis produk halal dibidang tersebut merupakan langkah yang patut diperhitungkan.

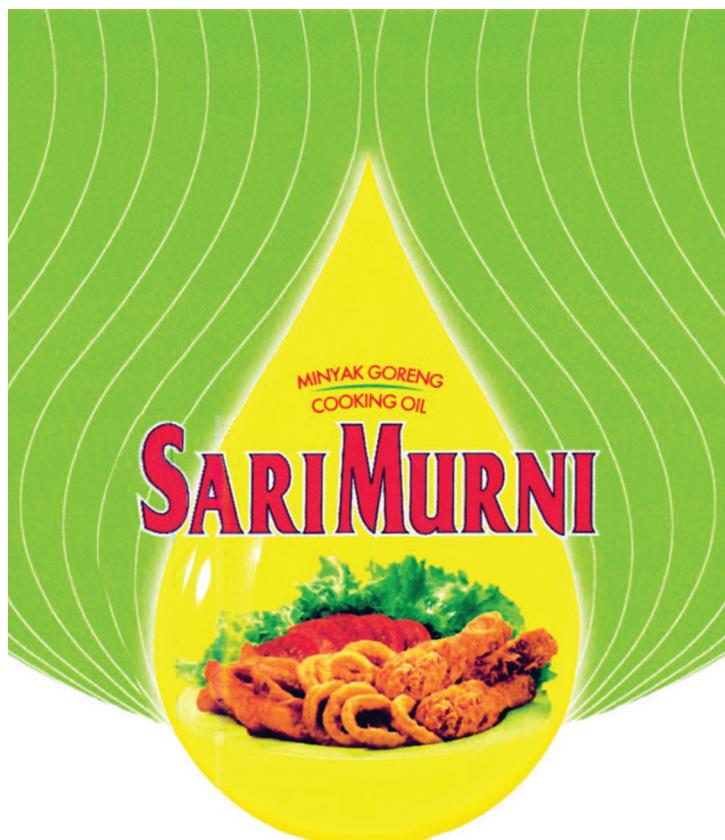
Merujuk pada ulasan *Jurnal Halal* di edisi ini, bisnis kuliner termasuk sektor yang cukup menjanjikan di tahun 2026. Secara lebih spesifik, bisnis kuliner tersebut mencakup makanan kesehatan, berbahan alami, dan praktis dengan memanfaatkan konten digital dan kemasan ramah lingkungan.

Selamat mencoba memasuki usaha baru, semoga berhasil. Setelah menentukan pilihan bisnis, segera lakukan pengurusan sertifikasi halal. Pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan secara online melalui situs BPJPH di ptsp.halal.go.id, yang selanjutnya membuat akun Sihalal, dan mengajukan permohonan sertifikat halal secara daring.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Banyak pengamat dan pelaku usaha memperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang, konsumsi produk halal diproyeksikan terus tumbuh. Oleh karena itu, keputusan untuk memulai bisnis produk halal dibidang tersebut merupakan langkah yang patut diperhitungkan.



DIPRODUKSI OLEH/PRODUCED BY :
PT. INCASI RAYA PADANG 25118. INDONESIA



INDONESIA HALAL OUTLOOK 2026: PERKUAT UMKM DAN TEKNOLOGI HALAL

Bisnis halal di Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh pada tahun 2026. Penguatan lini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan teknologi halal (halal tech) menjadi salah satu prasyarat untuk membangun ekosistem halal di dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global.

Pertengahan Desember 2025, Office of Chief Economist (Kantor Ekonomi) Bank Syariah Indonesia (BSI) menjabarkan proyeksi bisnis halal tahun 2026. Proyeksi tersebut disampaikan dalam *BSI Sharia Economic Outlook 2026 bertema Indonesia 2026: Resilient, Bold, and Promising.*"

Kepala Kantor Ekonomi BSI, Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan, industri halal menjadi penguat penting bagi kinerja perdagangan nasional. Konsumsi produk halal domestik diperkirakan mencapai US\$ 259,8 miliar pada 2026, tumbuh sekitar 5,88 persen, dan menyumbang lebih dari 30 persen konsumsi rumah tangga nasional.

Sedangkan di sisi ekspor, produk halal berkontribusi sebesar 20 persen dari total ekspor barang non-migas In-

donesia. Ekspor produk halal diproyeksikan naik menjadi US\$73,9 miliar dengan pertumbuhan sekitar 8,73 persen, termasuk ekspor non-sawit yang terus meningkat.

Menurut guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), Institut Pertanian Bogor (IPB University), Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec, meningkatnya potensi ekspor produk halal Indonesia didorong oleh semakin besarnya kesadaran masyarakat internasional tentang pentingnya produk halal yang berkonotasi dengan gaya hidup sehat.

Halal Times (www.halaltimes.com), sebuah platform media digital internasional yang mengulas industri halal global memperkirakan, pada tahun 2026, ekonomi halal global diproyeksikan akan melampaui USD 5 triliun.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumen muda, perdagangan digital, pengetatan regulasi, dan meningkatnya preferensi terhadap rantai pasok halal yang etis dan transparan. Industri halal yang dulu hanya berbasis makanan, kini berkembang ke bidang keuangan, farmasi, pariwisata, dan teknologi. "Bagi para pengusaha dan investor, 12–24 bulan ke depan, (sektor halal) akan menawarkan beberapa peluang paling beragam yang pernah ada," tulis *Halal Times*.

HALAL TECH DAN DIGITALISASI LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

Meta Platforms, Inc., perusahaan teknologi global, mengungkapkan tiga tren digital yang diperkirakan akan menjadi arus utama pada 2026, yakni meningkatnya tren produk halal, pesatnya pertumbuhan e-commerce lintas batas, serta optimalisasi performa platform digital melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*).

Manajer Kebijakan Publik Meta Platform Indonesia, Nadhila Renaldi, mengatakan tren produk halal di ranah digital diprediksi terus mengalami pertumbuhan signifikan. "Dengan semakin mudahnya perdagangan di masa depan, kami melihat terdapat potensi besar bagi pemasaran kreativitas nasional ke pasar global," ujar Nadhila, seperti dikutip *katadata.co.id*.

Dalam bisnis modern, teknologi halal (*halal tech*) diyakini mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan jangkauan pasar melalui otomatisasi, pemasaran digital, dan analisis data, sekaligus mempermudah komunikasi. Di bidang layanan sertifikasi halal, teknologi dan digitalisasi juga terbukti mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi.

Platform Cerol-SS23000 yang diimplementasikan Lembaga Pemeriksa Ha-

lal (LPH) LPPOM sejak 2012 misalnya, terbukti mampu menghadirkan solusi digital yang menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses sertifikasi halal bagi industri. Manfaat utama dari implementasi sistem Cerol-SS23000 adalah dalam efisiensi dan transparansi proses sertifikasi halal, yang dirasakan oleh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar. Saat ini, proses sertifikasi halal sudah terpusat melalui platform Sihalal yang dikelola langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Tidak hanya itu. Pada saat pandemi Covid-19 yang memaksa para pelaku usaha menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home/WFH*), LPPOM menerapkan protokol Modified On-site Audit (MosA) agar pelayanan sertifikasi halal tetap berjalan lancar. Protokol MosA merupakan hasil modifikasi metode audit, di mana dalam prosesnya tetap dilakukan audit untuk menilai pemenuhan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara daring. Hasil audit tersebut dapat diterima oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KF MUI) sebagai dasar ditetapkannya status kehalalan produk/jasa.

Sari Chairunnisa, Deputy CEO Paragon Technology and Innovation, menyatakan bahwa tahun 2026 merupakan fase penting di mana halal bergerak melampaui konsep kepatuhan (*compliance*) menuju kesadaran (*conscience*). Menurutnya, halal tidak lagi

dimaknai sebatas pemenuhan standar atau *checklist*, tetapi menjadi refleksi dari nilai yang diyakini konsumen tentang bagaimana sebuah produk dibuat, apa dampaknya, dan tanggung jawab apa yang dijalankan oleh brand di baliknya.

Sari Chairunnisa yang pada 2025 lalu tampil sebagai satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara di panggung global di California, Amerika Serikat, menjelaskan bahwa pihaknya melihat adanya irisan yang semakin kuat antara halal, *ethical beauty*, serta praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Halal menawarkan kerangka yang relevan untuk menjawab tuntutan ini, karena di dalamnya sudah melekat prinsip kehati-hatian, keterlacakkan, dan akuntabilitas proses. "Karena itu, halal semakin dipahami bukan hanya dalam konteks religius, tetapi sebagai pendekatan etis yang universal," ujarnya kepada *Jurnal Halal*. (Selengkapnya baca: "Ke Depan, Industri Halal Global Bergerak Menuju Arah yang Lebih Bertanggung Jawab").

Proyeksi senada disampaikan oleh Stefanus Indrayana, Wakil Kepala Divisi Corporate Communication PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Menurut Indrayana, di tahun 2026 akan terjadi pertumbuhan pasar halal yang kuat dan berkelanjutan, mulai dari makanan, minuman, bahan baku, hingga kosmetika di berbagai segmen.

“
Wakil Presiden RI ke-13 KH. Ma'ruf Amin menjelaskan, ke depan KIH ini juga akan memperoleh fasilitas seperti halnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga menarik bagi para investor.



Stefanus Indrayana
Head of CorpComm (Corporate Communication)
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

Produk halal, tambah Indrayana, bakal semakin menarik konsumen, termasuk non muslim karena hubungannya dengan kualitas, etika dan kesehatan. "Produk halal tidak hanya memenuhi status halal (secara syariah), namun mendukung gaya hidup, kesehatan, *lifestyle, health and consumer trust*," tukasnya kepada *Jurnal Halal*.

Meningkatnya gaya hidup halal tersebut, menurut Rhadeya Setiawan, *Chief of Scientific and Regulatory Affairs*, L'Oréal Indonesia, antara lain dipengaruhi oleh transformasi digital dan e-commerce: Pasar e-commerce halal sedang mengalami peningkatan pesat, yang diproyeksikan akan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Platform digital, termasuk media sosial dan situs e-commerce khusus, membuat produk halal lebih mudah diakses oleh khalayak global," ujarnya. (Selengkapnya baca : "Keberlanjutan Menjadi Fokus Utama Konsumen Muda")

MEMPERKUAT EKOSISTEM HALAL

Dengan potensi pasar yang sangat besar, apa yang bisa dilakukan? Irfan Syauqi Beik merekomendasikan agar Indonesia memperkuat ekosistem in-

dustri halal yang terintegrasi dan terkoaksi. Menurut *State of Global Islamic Economy* (SGIE), ekosistem halal mencakup banyak sektor, mulai dari makanan, obat-obatan, kosmetika, fesyen, keuangan, pariwisata, media hingga rekreasi.



Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec.
Pakar Ekonomi Syariah/Dekan FEM IPB University

Mengutip presentasi Nur Hidayah dan Lintang Titian dari Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), perkembangan ekosistem halal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif dan dinamis. Dengan dukungan kuat dari pemerintah dan potensi pasar domestik yang besar, Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk membangun ekosistem halal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Salah satu dukungan pemerintah yang sedang berkembang saat ini adalah dengan membangun Kawasan Industri Halal (KIH). Saat ini setidaknya telah ada 3 KIH utama yang sudah beroperasi, yakni Modern Halal Valley di Cikande, Banten, Safe N Lock di Sidoarjo, Jawa Timur dan Bintan Inti di Kepulauan Riau. Selain itu ada beberapa kawasan lain yang sedang dalam proses pengembangan. Keberadaan KIH sejatinya merupakan langkah strategis untuk memfasilitasi produksi, sertifikasi, dan logistik halal dalam satu lokasi.

Wakil Presiden RI ke-13 KH. Ma'ruf Amin menjelaskan, ke depan KIH ini juga akan memperoleh fasilitas seperti halnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga menarik bagi para investor. Pemerintah, tambah Ma'ruf Amin juga akan membangun Kawasan Halal, Aman dan Sehat (KHAS) yang ada di berbagai provinsi di Indonesia.

Namun demikian, menurut INDEF, implementasi atas KIH tersebut kurang optimal, sebab belum ada insentif fiskal maupun non-fiskal yang jelas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk masuk ke kawasan ini. Kurangnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan rendahnya pemanfaatan fasilitas halal center dan KIH. "Banyak UMKM belum menyadari potensi pasar halal global dan bagaimana cara mengaksesnya," tulis Nur Hidayah.

Untuk melakukan peningkatan peran UMKM, menurut Irfan pemerintah perlu melakukan penguatan dari sisi kebijakan. Perlu diberikan insentif bagi UMKM yang mampu menembus pasar ekspor. Yang juga tidak kalah penting adalah edukasi dan sosialisasi halal pada seluruh lapisan masyarakat dan stakeholders industri halal. Ini bertujuan agar persepsi mereka tentang industri halal bisa sama. "Sertifikasi halal harus diartikan sebagai opportunity untuk menembus pasar global, dan bukan dianggap sebagai beban," tegas Irfan kepada *Jurnal Halal*.

WAJIB SERTIFIKASI HALAL 2026 DAN PENGUATAN DAYA SAING UMKM

Kepala BPJPH Haikal Hasan menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang menetapkan wajib halal pada Oktober 2026, merupakan momentum penting untuk merebut pasar halal global. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengharuskan seluruh produk makanan dan minuman, termasuk obat, kosmetika, serta barang gunaan tertentu, untuk memiliki sertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026.

"Pelaksanaan Wajib Halal Oktober 2026 bukan hanya regulasi administratif, tetapi merupakan gerakan nasional menuju kualitas hidup dan ekonomi yang lebih sehat, bersih, dan berdaya saing global," ujarnya.

Haikal menyatakan, tujuan utama kewajiban sertifikasi halal 2026 adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen bahwa produk halal benar-benar sesuai syariat Islam. Wajib sertifikasi halal juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan kepercayaan pelaku UMKM.

Hingga pertengahan 2025, menurut data Kementerian UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta unit, naik sebesar 1,8 juta dibanding tahun 2024 sebanyak 64,2 unit. Selama ini, sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61 persen, atau setara Rp9.580 triliun di tahun 2024 lalu. Selain itu, sektor ini menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja, atau 97 persen dari total tenaga kerja nasional.

Dengan potensi yang sangat besar tersebut, pemerintah mendorong agar pelaku UMKM dapat naik kelas, menjadi pelaku usaha yang bisa bersaing di pasar global. Misalnya dengan fasilitasi program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi 1,35 juta sertifikat halal bagi pelaku UMKM.

Menurut data BPJPH jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia saat ini mencapai 9.052.806 produk. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, namun masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 66 juta unit.

Mengingat jumlahnya yang sangat banyak dan menyimpan potensi sangat besar, banyak pihak memberikan perhatian terhadap UMKM di Indonesia, termasuk Bank Indonesia. Dr. Rifki Ismail, Ph.D., Direktur Departemen Eko-

Menurut data BPJPH jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia saat ini mencapai 9.052.806 produk. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, namun masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 66 juta unit.

nomi dan Keuangan Syariah (DEKS), Bank Indonesia, menyatakan, Bank Indonesia ingin memperkuat rantai nilai halal yang benar-benar berdaya saing, melalui tiga pilar. Yakni pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan, serta riset, asesmen, dan edukasi yang berfokus di sektor riil di industri halal melalui program IKRA (Industri Kreatif Syariah) Indonesia.

Saat ini BI telah membina lebih dari 1.076 usaha syariah, terdiri dari 530 pelaku usaha halal food dan lebih dari 500 di sektor modest fashion. (*Selengkapnya baca Wawancara, Cetak Biru DEKS-BI 2025-2029: Dorong Penguatan Ekosistem Halal Nasional*).

Sementara itu, dalam Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga telah menggariskan peta jalan strategis untuk mengembangkan sektor industri halal di Indonesia. Masterplan ini dirancang sebagai langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

MPIHI 2023-2029 mengusung empat strategi utama yang menjadi fondasi pengembangan industri halal. Pertama, peningkatan produktivitas dan daya saing melalui optimalisasi kapasitas produksi, pengembangan SDM kompeten, dan peningkatan ino-

vasi di sektor halal. Kedua, penerapan serta penguatan kebijakan dan regulasi dalam bentuk penyelarasan peraturan untuk menciptakan ekosistem halal yang kondusif.

Ketiga, penguatan kuangan dan infrastruktur, melalui penyediaan akses pembiayaan serta pembangunan infrastruktur halal yang mendukung pertumbuhan industri. Keempat, penguatan halal brand and awareness, berupa peningkatan kesadaran publik terhadap produk halal dan memperkuat branding halal Indonesia di tingkat global, dengan program antara lain pengembangan UMKM halal.

Sementara itu, Elvina A. Rahayu, MP, Ketua Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI), menyatakan, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta bisnis halal global, pemerintah mutlak harus hadir pada aktivitas di berbagai sektor. Di sektor hulu perlu dilakukan pembentahan untuk mengurangi komponen impor yang bisa disubstitusi oleh Indonesia. Selain itu perlu juga perbaikan kelengkapan dan mekanisme supply chain dari hulu hingga hilir, seperti perbaikan infrastruktur dan pengawasan. "Sosialisasi pemerintah pada implementasi JPH ke semua stakeholder harus lebih masif dan terencana juga harus dilakukan," kata Elvina kepada *Jurnal Halal*. (***)



Sari Chairunnisa,
Deputy CEO Paragon Technology and Innovation

“KE DEPAN, INDUSTRI HALAL GLOBAL BERGERAK MENUJU ARAH YANG LEBIH BERTANGGUNG JAWAB”

Tahun 2026 merupakan fase penting di mana halal bergerak melampaui konsep kepatuhan (*compliance*) menuju kesadaran (*conscience*). Halal tidak lagi dimaknai sebatas pemenuhan standar atau *checklist*, tetapi menjadi refleksi dari nilai yang diyakini konsumen tentang bagaimana sebuah produk dibuat, apa dampaknya, dan tanggung jawab apa yang dijalankan oleh *brand* di baliknya.

Di tingkat global terdapat irisan yang semakin kuat antara halal, *ethical beauty*, serta praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Halal menawarkan kerangka yang relevan untuk menjawab tuntutan ini, karena di dalamnya sudah melekat prinsip kehati-hatian, keterlacakkan, dan akuntabilitas proses. Karena itu, halal semakin dipahami bukan hanya dalam konteks religius, tetapi sebagai pendekatan etis yang universal.

Bagi konsumen, khususnya generasi muda, halal kini menjadi bagian dari kesadaran hidup, tentang memilih produk yang aman, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai yang mereka pegang. Perubahan ini akan membentuk arah industri ke depan, di mana halal berperan sebagai fondasi nilai dan kesadaran, bukan sekadar alat diferensiasi pasar.

Diperkirakan, tahun 2026, arah industri kosmetika secara global bergerak menuju produk dan *brand* yang lebih bertanggung jawab baik secara sosial, etis, maupun lingkungan. Konsumen semakin memperhatikan kejelasan sumber bahan, praktik *cruelty free* dan vegan, serta bagaimana sebuah produk diproduksi dan dikonsumsi secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, halal memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari standar tersebut. Namun tantangannya adalah bagaimana halal dijalankan dan dikomunikasikan saat ini oleh ekosistemnya secara lebih luas. Jika halal hanya dipahami sebagai label atau *checklist* kepatuhan, maka nilainya akan terbatas.

Sebaliknya, ketika halal diposisikan sebagai bagian dari standar kebaikan yang lebih luas yang mencakup tanggung jawab, etika, dan keberlanjutan halal justru menjadi sangat relevan bagi konsumen yang lebih luas, baik di Indonesia maupun global.

HALAL BUKAN HAMBATAN INOVASI

Karena itu, penyelarasan antara halal, *ethical beauty*, dan keberlanjutan menjadi kunci. Halal bukan hambatan inovasi, melainkan kerangka yang memastikan bahwa kebaikan produk dan tindakan berjalan beriringan. Inilah yang kami lihat sebagai arah penting untuk memperluas dan mempertahankan relevansi standar halal ke depan.

Dari sisi bahan dan teknologi, kesadaran konsumen tersebut mendorong industri untuk lebih selektif dan bertanggung jawab. Penggunaan bahan berbasis *plant-based*, *biotech derived*, hingga *precision engineered ingredients* semakin berkembang karena dinilai lebih konsisten, aman, dan transparan. Teknologi seperti *enzymatic processing*, *precision fermentation*, dan *AI-based traceability* juga berperan penting dalam memastikan keterlacakkan dan integritas proses di sepanjang rantai pasok.

Halal dan teknologi tidak berjalan paralel, tetapi saling menguatkan. Teknologi membantu menjaga integritas halal, sementara prinsip halal memberikan arah etik dalam pemanfaatan teknologi itu sendiri. Dengan pendekatan ini, halal

dapat tumbuh sebagai bagian dari budaya industri bukan sekadar kepatuhan dan berkontribusi membangun ekosistem *beauty* yang lebih bertanggung jawab dan bermakna.

Bagaimana perusahaan melihat perubahan perilaku dan ekspektasi konsumen? Konsumen muslim semakin matang dalam mengambil keputusan. Seiring waktu, konsumen semakin bersedia berinvestasi pada produk yang berkualitas, relevan dengan kebutuhannya, dan selaras dengan nilai yang mereka yakini. Hal ini mencerminkan meningkatnya ekspektasi terhadap peran *brand*, khususnya di industri kecantikan.

PENTINGNYA MENGHADIRKAN NILAI TAMBAH

Di sisi lain, konsumen juga semakin teredukasi, *digital savvy*, dan mengharapkan pendekatan yang lebih personal dan relevan. Mereka tidak hanya mencari produk, tetapi juga pengalaman dan solusi yang membantu mereka memahami kebutuhannya secara lebih baik. Berbagi pengalaman dan rekomendasi juga menjadi bagian penting dalam membentuk preferensi dan keputusan konsumen.

Merespons hal tersebut, Paragon memandang pentingnya menghadirkan nilai tambah di luar produk, melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis pemahaman konsumen. Dengan memanfaatkan sains dan tek-

nologi, kami berupaya memberikan solusi yang lebih personal dan bermakna, sehingga hubungan dengan konsumen tidak berhenti pada transaksi, tetapi berkembang menjadi kepercayaan jangka panjang.

Kami melihat tren bergerak ke arah produk yang *purpose-driven, science-based, and relevant to real needs*. Produk multifungsi yang menggabungkan perawatan, proteksi, dan kenyamanan akan semakin diminati, seiring gaya hidup yang semakin dinamis.

Di kategori *skincare* dan *bodycare*, fokus pada *skin barrier, gentle yet effective actives*, serta *microbiome friendly formulation* akan terus menguat. Konsumen juga mencari pengalaman yang lebih holistik, produk yang tidak hanya bekerja secara klinis, tetapi juga memberikan kenyamanan sensorik dan rasa aman dalam penggunaan jangka panjang. Selain itu, keberlanjutan bukan lagi nilai tambah, melainkan ekspektasi dasar. Kemasan rendah emisi, sistem *refill*, dan transparansi proses akan semakin memengaruhi keputusan pembelian.

Kami merespons perkembangan ini dengan memperkuat posisi Paragon sebagai perusahaan kecantikan berbasis sains, teknologi, dan nilai kebermanfaatan. Dengan portofolio 14 *brand*, kami melayani kebutuhan konsumen yang sangat beragam dari remaja hingga keluarga tanpa kehilangan konsistensi pada prinsip halal dan kualitas.

Inovasi kami lahir dari pemahaman mendalam terhadap konsumen dan perkembangan global, lalu diterjemahkan ke dalam solusi yang relevan

di setiap segmen. Mulai dari pengembangan teknologi seperti *microbiome-based skincare* hingga adopsi *global micro trends* yang disesuaikan dengan konteks lokal. Di saat yang sama, kami menjalankan *roadmap* keberlanjutan jangka panjang mengoptimalkan bahan, proses produksi, dan kemasan karena kami percaya bahwa pertumbuhan yang sehat hanya mungkin terjadi jika selaras dengan kebermanfaatan.

TANTANGAN DAN KOMITMEN

Ke depan tantangan terbesar terletak pada kompleksitas dan konsistensi. Rantai pasok global melibatkan banyak pemasok dengan tingkat keserapan sistem yang berbeda, sementara tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas terus meningkat. Menjaga kepatuhan halal, efektivitas produk, dan efisiensi biaya secara bersamaan membutuhkan investasi teknologi, penguatan tata kelola, serta kolaborasi lintas fungsi yang solid.

Namun bagi kami, kompleksitas ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang untuk menghadirkan produk yang tidak hanya efektif, tetapi juga terpercaya. Selain itu, kebutuhan utama industri adalah keselarasan ekosistem. Standardisasi internasional sertifikasi halal akan sangat membantu mempercepat inovasi lintas negara tanpa mengorbankan kepatuhan.

Digitalisasi proses sertifikasi dan akses terhadap global halal *ingredient database* juga menjadi krusial agar perusahaan dapat memastikan kepatuhan sejak tahap riset dan formulasi. Kami melihat ruang kolaborasi yang besar antara industri, regulator, dan lembaga halal, khususnya dalam pengembangan bahan berbasis bioteknologi yang aman, halal, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan kolaboratif, inovasi dapat bergerak lebih cepat sekaligus menjaga kepercayaan publik. (***)

Mereka tidak hanya mencari produk, tetapi juga pengalaman dan solusi yang membantu mereka memahami kebutuhannya secara lebih baik.



Rhadeya Setiawan,
Chief of Scientific and Regulatory Affairs, L'Oréal Indonesia

“KEBERLANJUTAN MENJADI FOKUS UTAMA KONSUMEN MUDA”

Meningkatnya gaya hidup halal yang meluas melampaui makanan hingga mencakup berbagai produk dan layanan, termasuk kosmetika, farmasi, *fesyen*, dan pariwisata akan menjadi tren halal Indonesia di tahun 2026.

Pendekatan holistik tersebut, yang sering disebut sebagai “gaya hidup halal”, menyiratkan tuntutan konsumen mencari produk yang tidak hanya diperbolehkan tetapi juga bermanfaat, bersih, sehat (*halalan thayiban*), dan diproduksi secara bertanggung jawab.

Tren yang juga bakal terjadi adalah transformasi digital dan e-commerce. Pasar e-commerce halal sedang mengalami peningkatan pesat, yang diproyeksikan akan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Platform digital, termasuk media sosial dan situs e-commerce khusus, membuat produk halal lebih mudah diakses oleh khalayak global. Tren ini semakin dipercepat oleh penggunaan teknologi verifikasi, yang memungkinkan konsumen untuk langsung memeriksa status halal suatu produk.

Tren-tren yang teridentifikasi akan sangat membentuk arah industri halal pada tahun 2026, khususnya dalam hal bahan dan teknologi. Konsumen lebih proaktif dalam meneliti bahan-bahan. Preferensi produk tidak hanya bergantung pada khasiat, tetapi juga transparansi dan ketertelusuran. Mulai dari label yang dapat dilacak secara digital pada produk hingga alat berbasis AI untuk menyaring rekomendasi produk, yang kebutuhan utamanya adalah mendapatkan analisis dan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan sesuai dengan gaya hidup halal.

Salah satu contohnya adalah Ilmu Mikrobioma yang kami fokuskan pada kesehatan dan kesejahteraan kulit. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip kecantikan holistik. Pengembangan solusi perawatan kulit yang dipersonalisasi berdasarkan analisis mikrobioma, seperti L'Oréal Cell Bio-Print, menawarkan pendekatan canggih untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen.

Poin berikutnya adalah inovasi ilmiah itu sendiri, di mana teknologi digunakan untuk mengembangkan formulasi produk yang memenuhi kebutuhan segmen konsumen ini. Di bidang ini, kami tidak hanya mempersiapkan tetapi juga merangkulnya dalam inovasi ilmiah kami. Misalnya, komitmen L'Oréal terhadap Ilmu Hijau dan Keberlanjutan. Kami berkomitmen pada transformasi berkelanjutan, dengan tujuan untuk mendapatkan lebih dari 75% bahan dari alam (seperti sumber tanaman atau mineral) atau dari bahan daur ulang dalam formula pada tahun 2030. Hal ini sejalan dengan prinsip halal, yang menekankan bahan-bahan alami dan murni.

BERADAPTASI DENGAN PERUBAHAN PERILAKU KONSUMEN

Perusahaan mengamati dan beradaptasi dengan cermat terhadap pergeseran signifikan dalam perilaku dan harapan konsumen Muslim, di antaranya:

- Permintaan akan Keaslian dan Kepercayaan:** Konsumen lebih berpendidikan dan cerdas. Mereka tidak lagi menerima sertifikasi halal begitu saja, tetapi mencari jaminan yang lebih mendalam mengenai seluruh rantai nilai. Mereka mencari merek yang autentik dan transparan dalam komunikasinya.
- Kecerdasan dan Keterlibatan Digital:** Konsumen Muslim sangat aktif di platform digital dan media sosial. Mereka menggunakan saluran ini untuk meneliti produk, berbagi pendapat, dan terhubung dengan merek. Perusahaan yang dapat berinteraksi secara efektif dengan konsumen Muslim di platform ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan.

Kami melihat beberapa tren utama yang membentuk cara orang memilih produk kecantikan saat ini. Pertama, keberlanjutan menjadi fokus utama konsumen muda, terutama generasi Z, sangat peduli dengan pilihan yang dapat diisi ulang dan ramah lingkungan. Hal ini terkait langsung dengan apa yang ada di pasar: budaya isi ulang, kemasan sirkular, dan formula yang lebih ramah lingkungan sudah menjadi bagian dari rencana kami, termasuk di Indonesia.

Sebuah studi oleh *IDN Times* mengungkapkan bahwa 86% konsumen Gen-Z menunjukkan minat pada produk berkelanjutan. Selain itu, 90% konsumen berusia 18-24 tahun bahkan bersedia membayar lebih untuk produk isi ulang dan berkelanjutan. Tren kecantikan berkelanjutan ini sejalan dengan L'Oréal For The Future, komitmen keberlanjutan L'Oréal Groupe untuk tahun 2030.

Kedua, personalisasi adalah pendorong besar lainnya dalam kecantikan. Banyak pengguna perawatan kulit bereksperimen sebelum menemukan apa yang cocok untuk mereka, dan dengan alat AI baru, rekomendasi yang diper-

Perusahaan beradaptasi dengan perubahan dengan cara yang berbeda-beberapa fokus pada inovasi produk, yang lain pada peningkatan rantai pasokan, upaya keberlanjutan, atau keterlibatan digital dengan konsumen.

sonalisasi menjadi lebih tepat. L'Oréal adalah salah satu pelopor *Beauty Tech*. Serangkaian alat yang dikembangkan dengan teknologi canggih dan pengalaman konsumen terhadap kecantikan untuk mempromosikan personalisasi, layanan yang lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan. Misalnya, La Roche-Posay Effaclar Spotscan+, alat analisis kulit yang didukung oleh teknologi AI yang telah divalidasi oleh Perdoski (Perhimpunan Dermatologi dan Venereologi Indonesia). Alat ini dapat mengevaluasi tingkat keparahan jerawat, dan merekomendasikan rutinitas perawatan kulit yang dipersonalisasi.

Perusahaan beradaptasi dengan perubahan dengan cara yang berbeda—beberapa fokus pada inovasi produk, yang lain pada peningkatan rantai pasokan, upaya keberlanjutan, atau keterlibatan digital dengan konsumen. Di L'Oréal Indonesia, kami melihat tren ini—khususnya regulasi halal, dorongan keberlanjutan, dan transformasi digital—sebagai kekuatan yang membentuk masa depan kecantikan di sini.

Dengan pengalaman lebih dari empat dekade, kehadiran perusahaan selama 46 tahun dan kemampuan manufaktur lokal yang kuat di pabrik Yasulor, L'Oréal Indonesia terus membangun komitmen terhadap kualitas, inklusivitas, dan pengembangan talenta lokal saat memasuki tahun 2026.

Adaptasi rantai pasokan untuk memenuhi standar halal dan keberlanjutan global menghadirkan sejumlah tantangan signifikan, antara lain: Pertama, rantai pasokan global bisa lebih rumit, terutama di industri kosmetik di mana bahan-bahan inovatif baru diperkenalkan dengan sangat cepat.

Ekosistem bahan halal belum sepenuhnya siap dibandingkan dengan bahan makanan. Jadi, perusahaan kosmetik harus mengerjakan semuanya dari awal setiap kali dengan pemasok bahan baku. Fakta bahwa industri kosmetik Indonesia masih bergantung pada 80% bahan baku impor, menjadikannya tantangan khusus untuk produk kosmetik dengan bahan baku yang berasal dari berbagai negara.

Kedua, menerapkan sistem dan proses yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal dan keberlanjutan dapat memakan biaya yang besar. Ini termasuk biaya sertifikasi, audit, dan teknologi, serta biaya pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam membangun ekosistem halal untuk bahan baku pemasok di seluruh dunia.

Ketiga, kurangnya standar yang terharmonisasi untuk standar halal global dan perjanjian pengakuan timbal balik sertifikat halal di antara Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN). (***)



MELALUI CETAK BIRU, BANK INDONESIA DORONG PENGUATAN EKOSISTEM HALAL NASIONAL

DR. RIFKI ISMAL, PH.D.,

Direktur Departemen Ekonomi dan
Keuangan Syariah, Bank Indonesia.

Memasuki periode 2025–2029, Bank Indonesia memperkuat arah ekonomi dan keuangan syariah melalui blueprint (*cetak biru*), yang didalamnya termasuk aspek penguatan rantai nilai halal (*halal value chain*). Upaya ini dibarengi pendalaman keuangan syariah serta penguatan riset dan edukasi.

Sebagai bentuk konsistensi dalam memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan syariah nasional, Bank Indonesia (BI) menerbitkan *Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah* sebagai panduan strategis. Setelah berhasil menuntaskan periode pertama 2017–2024, BI kini memasuki fase baru 2025–2029 dengan arah kebijakan yang semakin terstruktur dan terukur.

Cetak biru ini memetakan tiga pilar utama. Pertama, pemberdayaan ekonomi syariah yang salah satu poinnya mencakup halal value chain. Kedua, pendalaman pasar keuangan syariah. Ketiga, penguatan riset, asesmen, dan edukasi.

Ketiganya berperan secara berkesinambungan untuk meningkatkan daya saing industri halal nasional. Untuk menggali lebih jauh arah kebijakan dan strategi implementasinya, berikut petikan wawancara tim redaksi *Jurnal Halal LPPOM* dengan Dr. Rifki Ismal, Ph.D., Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia.

APA FOKUS UTAMA BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PERIODE 2025–2029?

Bank Indonesia ingin memperkuat rantai nilai halal yang benar-benar berdaya saing, sehingga keuangan syariah harus dioptimalkan. Dalam *blueprint* periode pertama, BI berupaya memperkuat peran keuangan syariah, baik komersial maupun sosial, dengan mendalamkan, mensinergikan, dan mengekspansikan ekosistem mulai dari pasar pembiayaan hingga zakat, wakaf, dan infak. Semua ini dilihat dalam perspektif ekonomi makro: apakah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan. Hingga kini, arah perkembangannya dinilai positif.

MENGAPA LITERASI DAN INKLUSI MENJADI PENEKANAN PENTING DALAM LIMA TAHUN KE DEPAN?

Pada *blueprint* periode sebelumnya (2017–2024), BI berfokus pada literasi. Sementara lima tahun ke depan (2025–2029) berfokus pada literasi sekaligus inklusi. Survei BI menunjukkan bahwa tingkat literasi ekonomi syariah berada di angka 42,8 persen, namun survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan inklusi syariah baru 13 persen. Artinya, banyak masyarakat tahu konsep ekonomi syariah, tetapi belum tentu menggunakan layanan keuangan syariah atau mengonsumsi produk halal secara sadar. Karena itu, peningkatan inklusi menjadi prioritas besar ke depan.



DARI TIGA PILAR EKONOMI SYARIAH, PILAR MANA YANG MENJADI TITIK TEKAN SAATINI?

Ketiga pilar pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan, serta riset, asesmen, dan edukasi tidak bisa dibandingkan, karena semuanya harus berjalan simultan. Namun untuk tahun ini, pilar pertama menjadi fokus, yaitu sektor riil di industri halal. Sektor yang menjadi fokus pada tahun ini, di antaranya: makanan-minuman halal, pariwisata ramah muslim, dan *modest fashion*. Pilar kedua mendukung dari sisi keuangan syariah, sementara pilar ketiga menjadi hasil dari penguatan dua pilar sebelumnya.

APA SAJA PROGRAM BI DALAM PENGUATAN INDUSTRI HALAL?

Melalui program IKRA (Industri Kreatif Syariah) Indonesia, BI telah membina lebih dari 1.076 usaha syariah, terdiri dari 530 pelaku usaha *halal food* dan lebih dari 500 di sektor *modest fashion*. Seleksinya ketat, dan mereka yang lolos menerima pembinaan intensif sebagai usaha unggulan.

Pilar kedua berhubungan dengan sektor keuangan syariah—bank, non-bank, pasar keuangan, dan keuangan sosial yang menjadi penopang utama bagi sektor riil. Salah satu program strategis yang didorong bersama KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan adalah inisiasi SEDF (Syariah Economic Development Fund) untuk memperkuat lembaga keuangan sosial

Islam skala nasional. Harapannya, program ini mampu memberi dampak besar bagi ekosistem syariah di masa mendatang.

APA TANTANGAN TERBESAR DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI SYARIAH NASIONAL?

Pengembangan ekonomi syariah masuk ke ranah *amal jama'i*, yaitu kerja kolaboratif yang melibatkan banyak lembaga. Sertifikasi halal berada di ranah MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), sedangkan zakat dan wakaf menjadi kewenangan BAZ-NAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia).

BI tidak memiliki otoritas langsung, tetapi tetap mendorong integrasi karena usaha halal tidak dapat dilepaskan dari peran keuangan sosial. Dalam praktiknya, banyak usaha kecil dapat memulai bisnis dari dana wakaf atau sedekah, dan ketika mengalami kesulitan usaha dapat dibantu melalui dana infak.

BAGAIMANA TINGKAT LITERASI EKONOMI SYARIAH DI MASYARAKAT SAATINI?

Dalam survei literasi yang dilakukan terhadap 6.000 responden di 33 provinsi, kelompok ibu rumah tangga menunjukkan tingkat literasi terendah, sementara yang tertinggi adalah profesional, PNS, dan dosen. Temuan ini menjadi catatan penting bahwa edukasi ekonomi syariah harus lebih diperkuat pada kelompok keluarga dan komunitas, melalui organisasi perempuan dan pelaku UKM.

BAGAIMANA CAPAIAN BLUEPRINT PERIODE PERTAMA TAHUN 2017-2024?

Secara umum, capaian periode pertama dinilai baik. Tingkat literasi ekonomi syariah meningkat dari 22 persen menjadi 42,8 persen. Selain itu, capaian lain terlihat dari penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang

mencatat transaksi riil sebesar 3,1 triliun rupiah pada tahun ini. Data ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki kontribusi nyata dan semakin berkembang dalam skala nasional.

BAGAIMANA PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI HALAL, KHUSUSNYA IKRA?

Jumlah anggota IKRA terus meningkat setiap tahun, dengan rata-rata penambahan 40–70 usaha baru. Setelah melalui seleksi ketat, para pelaku usaha mendapatkan pendampingan komprehensif. Saat ini, sektor makanan dan minuman halal menjadi lokomotif utama industri halal, mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk halal food. Sementara itu, sektor kosmetik tengah memasuki fase transisi menuju produk berbasis prinsip syariah, sementara farmasi telah mendapat perhatian meskipun belum digarap secara mendalam.

APA PROGRAM STRATEGIS YANG AKAN DIJALANKAN BI PADA TAHUN 2026?

Program strategis yang disiapkan BI mencakup peningkatan jumlah pelaku IKRA yang dapat menembus pasar global, memperbesar keterlibatan kementerian dan lembaga, mendorong

pertumbuhan keuangan syariah yang lebih besar, serta memperkuat keuangan sosial melalui lembaga SEDF yang akan dikelola KNEKS.

APA REKOMENDASI STRATEGIS BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN?

Rekomendasi utamanya merujuk pada arah *blueprint* BI, yaitu memperkuat rantai nilai halal, memperdalam pasar keuangan syariah, meningkatkan kolaborasi antar-lembaga, dan mempercepat literasi serta inklusi. Kerja bersama harus terus ditingkatkan agar pembangunan ekonomi syariah berjalan secara komprehensif.

BAGAIMANA PANDANGAN ANDA TENTANG GAYA HIDUP HALAL MASYARAKAT INDONESIA?

Sebagai muslim, seharusnya masyarakat memiliki perhatian besar terhadap industri halal. Gaya hidup *kaffah* perlu diimplementasikan, yang mencakup transaksi keuangan syariah, busana Islami, hiburan Islami, hingga pendidikan Islami. Meskipun tidak semua bisa diterapkan sekaligus, masyarakat perlu bergerak bertahap menuju gaya hidup halal sesuai tuntunan agama.

Terkait gaya hidup Islami ini juga tidak ada larangan diterapkan oleh non-muslim, misalnya bertransaksi syariah atau mengonsumsi produk halal, karena prinsip syariah bersifat *rahmatan lil 'alamin*. Dengan demikian, partisipasi non-muslim tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dapat memperkuat ekosistem halal nasional. (YN)

Maka dari itu kami punya tren *fashion forecasting* untuk 2026. Jadi kebanyakan menerjemahkan tentang alam, tentang *sustainability*. Tapi sebenarnya itu sama. Kami ingin menyelamatkan bumi

Perusahaan Anda Belum Memiliki Penyelia Halal?

Waktu Anda Terbatas! Proses Sertifikasi
Wajib Sertakan Penyelia Halal!



Yuk, Daftar Sekarang!



Diskon
25% hingga

~~Rp. 4.700.000~~

Kode Promo: **PHLPPOM**

Masukkan kode ini saat pendaftaran untuk
mendapatkan harga khusus.

Fasilitas Pelatihan:



Sertifikat Pelatihan
diakui **BPJPH**



Sertifikasi Kompetensi
berlisensi **BNSP**



Materi Pelatihan
lengkap

Kelas tersedia di berbagai jadwal!

Regulasi Indonesia PP No 42 Tahun 2024

• Pasal 50

Pelaku Usaha yang mengajukan sertifikasi
Halal **WAJIB** memiliki **Penyelia Halal**.

• Pasal 60

Syarat Penyelia Halal:

- Beragama Islam
- Memiliki wawasan luas dan memahami
syariat tentang kehalalan

Hubungi: CS +62 811-1148-696

LPPOM CONNECT

*Igniting Hope, Reinforcing Quality,
Aligning Collaboration*

Bogor, 19 Januari 2026



LPPOM CONNECT 2026: REFLEKSI DAN PENGUATAN KINERJA LPPOM DALAM MENJAGA AMANAH HALAL

LPPOM Connect 2026 menjadi momentum refleksi dan penguatan kinerja LPPOM dalam menjaga amanah halal di tengah dinamika industri yang terus berkembang, sekaligus menyelaraskan langkah untuk menghadirkan jaminan halal yang berintegritas dan dapat dipercaya umat.

D i tengah dinamika perubahan dan tantangan yang terus berkembang, LPPOM menapaki perjalannya dengan satu pijakan utama: menjaga amanah halal bagi umat. Perjalanan ini tidak selalu mudah, namun justru menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan kinerja organisasi untuk memastikan kualitas dan kepercayaan publik terhadap jaminan halal tetap terjaga.

Dengan mengusung tema "*Igniting Hope, Reinforcing Quality, Aligning Collaboration*", LPPOM Connect 2026 yang digelar pada 19 Januari 2026 di Bigland Hotel, Bogor, hadir sebagai momentum penting untuk berhenti sejenak, meninjau kembali langkah yang telah ditempuh, serta

menyelaraskan arah ke depan melalui refleksi kolektif dan penguatan kolaborasi guna memperkokoh peran strategis LPPOM di masa depan.

Lebih dari sekadar agenda rutin, LPPOM Connect 2026 dimaknai sebagai ruang untuk meneguhkan kembali komitmen bersama. Di tengah tuntutan kerja yang semakin kompleks, forum ini menjadi pengingat bahwa kinerja LPPOM dibangun melalui kolaborasi, keterhubungan nilai, dan kesadaran akan amanah yang diemban. Masa depan LPPOM tidak ditentukan oleh satu individu, melainkan oleh seluruh insan yang terus melangkah beriringan menjaga mutu dan integritas halal.



Dalam sambutannya, Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, menyampaikan refleksi atas perjalanan organisasi yang sarat dengan tantangan sekaligus keberkahan. Ia menegaskan bahwa LPPOM telah menghadapi berbagai rintangan, namun juga merasakan limpahan kebaikan dari setiap ikhtiar yang dilakukan.

Seluruh upaya tersebut, menurutnya, ditujukan untuk kemaslahatan bersama, khususnya dalam menjaga umat agar dapat mengonsumsi produk halal dengan ketenangan dan keyakinan. Refleksi ini menjadi bagian penting dalam penguatan kinerja LPPOM agar tetap relevan dan dipercaya.

Seiring dengan perkembangan industri dan regulasi halal, tantangan yang dihadapi pun semakin kompleks. Muti menyoroti pentingnya menjaga substansi halal di tengah dinamika tersebut. LPPOM memandang bahwa setiap produk halal yang beredar harus benar-benar memenuhi prinsip halal secara menyeluruh, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.

Penegasan ini menjadi cerminan arah kinerja LPPOM yang tidak berhenti pada prosedur, tetapi berorientasi pada jaminan halal yang sesungguhnya.

"Yang lebih penting adalah bagaimana proses sertifikasi halal dapat memberikan jaminan halal yang sesungguhnya, dan pelaku usaha dapat menjaga kehalalan produknya serta mempertanggungjawabkannya kepada konsumen," ujar Muti.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Wakil Ketua Umum MUI, KH. M. Cholil Nafis, Ph.D., yang memaparkan bahwa isu halal kini telah berkembang melampaui ranah keagamaan semata. Halal telah menjadi isu sosial yang berkaitan erat dengan kepercayaan publik, transparansi industri, serta perkembangan teknologi pangan dan produk industri lainnya. Dalam konteks ini, sertifikasi halal harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan sosial. Edukasi serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat ekosistem halal nasional. Ia menegaskan,

"Halal hari ini bukan hanya isu keagamaan, tetapi juga isu sosial yang menyangkut kepercayaan publik dan transparansi industri. Sertifikasi halal tidak boleh berhenti pada selembar dokumen regulatif, tetapi harus menjadi jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen," terang Kiai Cholil.

Nilai reflektif dan spiritual dalam penguatan kinerja organisasi semakin diperdalam melalui tausiyah Wakil Ketua Umum MUI, Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag. Ia menekankan bahwa dalam organisasi modern, hubungan antara pemimpin dan tim tidak dapat dibangun melalui instruksi satu arah, melainkan melalui keterhubungan nilai dan rasa saling memahami. Pemimpin berperan menjaga visi, sementara tim memastikan implementasi berjalan efektif.

"Spiritualitas memberikan makna atas pekerjaan, memandu motivasi, serta menjadi sumber daya batin untuk bertahan di situasi sulit. Hal ini selaras dengan konsep amanah dalam kerja halal, di mana pekerjaan tidak hanya diukur melalui output, tetapi juga melalui pertanggungjawaban," jelas Buya Anwar.

Melalui LPPOM Connect 2026, refleksi dan penguatan kinerja LPPOM dirajut dalam satu semangat kebersamaan. Forum ini menegaskan bahwa menjaga amanah halal adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan keselarasan langkah, integritas, dan kolaborasi berkelanjutan. Dengan fondasi tersebut, LPPOM menatap tahun 2026 dengan keyakinan yang lebih kuat untuk terus menjadi penjaga kepercayaan umat dan pilar penting dalam ekosistem halal Indonesia. (ZUL)



DARI DAPUR MBG HINGGA PANGGUNG GLOBAL: PERAN STRATEGIS LPPOM KOKOHKAN EKOSISTEM HALAL INDONESIA SEPANJANG 2025

Tahun 2025 menjadi momentum reflektif sekaligus optimistis bagi LPPOM untuk menegaskan kembali perannya dalam membangun ekosistem halal Indonesia yang kuat, inklusif, dan berdaya saing global. Berbagai capaian sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa melalui kolaborasi yang solid dan komitmen yang konsisten, ekosistem halal nasional mampu tumbuh semakin kokoh serta siap bersaing di tingkat global.

Pada saat yang sama, pemerintah memperkuat Program Makan Bergizi

Gratis (MBG) sebagai upaya menjamin kecukupan gizi generasi muda Indonesia, yang secara langsung juga menuntut kepastian kehalalan pangan yang dikonsumsi setiap hari. Dalam konteks inilah peran sertifikasi halal menjadi krusial. LPPOM hadir sebagai mitra strategis negara dengan mendukung implementasi kebijakan tersebut melalui pemeriksaan kehalalan dapur-dapur MBG di berbagai daerah, memastikan aspek gizi dan kehalalan berjalan seiring demi masa depan generasi bangsa.

Didukung jaringan di 34 provinsi dan lebih dari 800 auditor berkompeten, LPPOM berupaya memastikan proses sertifikasi halal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bagi dapur MBG berjalan efektif dan sesuai standar. Sertifikat halal menjadi instrumen penting untuk mencegah risiko kontaminasi bahan haram atau najis sejak tahap awal hingga penyajian. Lebih dari sekadar prosedur administratif, upaya ini mencerminkan kepedulian LPPOM dalam menjaga masa depan generasi bangsa.

Di tingkat nasional, LPPOM juga terus memperkuat ekosistem halal dari sisi hulu. Tantangan besar dalam rantai pasok halal kerap muncul pada tahap awal produksi, salah satunya pada jasa penggilingan daging. Menjawab tantangan tersebut, LPPOM menginisiasi berbagai program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Melalui Festival Syawal 1446 H, sebanyak 103 jasa penggilingan daging di berbagai provinsi mendapatkan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal. Langkah ini tidak hanya memperkuat kepatuhan, tetapi juga membuka peluang peningkatan daya saing UMK.

Sementara di tingkat global, LPPOM melalui Laboratorium LPPOM MUI tampil di kancah global, tepatnya di forum internasional Association of Official Analytical Chemists (AOAC) di Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Kehadiran sebagai pembicara dan penyaji karya ilmiah menegaskan bahwa

Melalui program Gen Halal Championship, LPPOM mengajak pelajar dari seluruh Indonesia memahami halal sebagai bagian dari karakter dan gaya hidup.

LPPOM tidak hanya menjalankan sertifikasi halal, tetapi juga aktif berkontribusi dalam pengembangan metode ilmiah pengujian halal yang diakui secara global.

Selain itu, dedikasi LPPOM dalam layanan sertifikasi halal juga mendapatkan pengakuan internasional. Pada September 2025, LPPOM meraih GIFA Championship Award 2025 untuk kategori Sertifikasi Halal dalam ajang Global Islamic Finance Awards di Kuala Lumpur. Penghargaan ini menegaskan posisi LPPOM sebagai lembaga yang konsisten menjaga kredibilitas dan kualitas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat reputasi Indonesia dalam ekosistem halal global.

Di sisi lain, LPPOM menyadari bahwa masa depan ekosistem halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan teknologi, tetapi juga oleh kesadaran generasi penerus. Melalui program Gen Halal Championship, LPPOM mengajak pelajar dari seluruh Indonesia memahami halal sebagai bagian dari karakter dan gaya hidup.

Tingginya antusiasme pendaftar mencapai 1.493 siswa dan siswi dari seluruh provinsi di Indonesia menjadi cerminan tumbuhnya semangat literasi halal sejak dulu. Ini merupakan investasi jangka panjang yang akan menjaga keberlanjutan sistem sertifikasi halal di Indonesia.

Menjaga halal berarti menjaga nilai, dan merawat harapan berarti memastikan keberlanjutan. Di usia ke-37, LPPOM melangkah dengan optimisme, berbekal pengalaman panjang, inovasi, dan semangat kolaborasi untuk terus menjadi garda terdepan dalam layanan sertifikasi halal. (YN)





1.493 PENDAFTAR, TIGA JUARA LAHIR! GEN HALAL CHAMPIONSHIP CETAK GENERASI SADAR HALAL

Gen Halal Championship 2025 mencuri perhatian pelajar dari seluruh Indonesia dengan 1.493 pendaftar dan hanya 45 finalis terpilih. Melalui rangkaian *bootcamp* hingga *grand final* di Bogor, ajang LPH LPPOM ini melahirkan tiga juara baru yang siap menjadi penggerak literasi halal di masa depan.

PPOM kembali mencuri perhatian publik melalui gelaran Gen Halal Championship 2025, sebuah program kompetisi literasi halal yang ditujukan bagi pelajar SMA/SMK/MA sederajat di seluruh Indonesia. Tingginya antusiasme masyarakat menegaskan bahwa isu halal semakin dekat dengan kesadaran generasi muda. Pada tahun ini, tercatat 1.493 siswa mendaftar—jumlah yang mencerminkan minat yang terus bertumbuh. Setelah melalui dua tahap seleksi yang ketat, hanya 45 peserta terbaik berhasil melaju ke babak final.

Para finalis tersebut mewakili keberagaman geografis Indonesia: 13 provinsi, 20 kota, dan 32 sekolah, dengan Provinsi Riau menjadi penyumbang peserta terbanyak, yakni 14 siswa. Mereka mengikuti rangkaian *bootcamp* dan *grand fi-*

nal pada 9–11 Januari 2026 di Camp Hulu Cai, Bogor, Jawa Barat, sebelum akhirnya menuju malam penghargaan.

Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, menjelaskan bahwa Gen Halal Championship sejak awal dirancang bukan sekadar sebagai ajang perlombaan, melainkan sebagai upaya sistematis untuk memperkuat literasi halal di kalangan generasi muda. "Kegiatan ini kami rasa perlu. Karena meskipun Indonesia negara dengan mayoritas Muslim terbesar, halal sudah menjadi kewajiban, tetapi literasi halal belum sebaik yang kita harapkan," ujarnya, menyoroti ruang besar untuk perbaikan pemahaman masyarakat.

Menurutnya, pemahaman yang cukup mengenai halal memiliki dampak langsung pada ekosistem usaha. "Do-

rongan pelaku usaha untuk mempertahankan kehalalan produknya atau mensertifikasi halal produknya tidak akan hadir jika tidak ada tuntutan dari masyarakat. Dan masyarakat tidak akan melakukannya jika tidak mengetahuinya." Dengan kata lain, literasi halal bukan hanya kebutuhan personal, tetapi juga fondasi bagi tumbuhnya industri halal nasional.

Muti menambahkan bahwa pelajar dipilih sebagai sasaran utama karena peran mereka sebagai pembawa nilai dan agen perubahan masa depan. "Kami menyadari betul literasi halal harus dibina dari generasi muda. Oleh karena itu, kita hidupkan lagi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dihidupkan di tahun mendatang," jelasnya.

Satu temuan menarik dari penyelemparaan tahun ini adalah semakin inklusifnya isu halal. Peserta tidak datang semata dari kalangan Muslim. "Judulnya Gen Halal Championship, tapi yang mendaftar ternyata bukan hanya dari siswa/i Muslim, tapi juga ada siswa/i non-Muslim yang ikut mendaftar. Bahkan ada yang ikut sampai ke grand final," ungkap Muti.

Fenomena tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa halal semakin dipahami sebagai standar universal terkait kualitas, keamanan, dan kenyamanan produk. "Konsumen non-Muslim percaya bahwa produk halal itu baik, karena halal harus beriringan dengan thayyib."

Dengan membawa tema "Explore, Compete, Inspire", Gen Halal Championship menanamkan pengalaman edukatif yang bermakna. "Explore mengajak pelajar berani menggali ilmu halal lebih luas dan kritis. Compete menumbuhkan semangat berkompetisi. Sementara Inspire mendorong para peserta menjadi sumber perubahan dan inspirasi," kata Muti. Ia berharap energi positif itu mengalir ke sekolah, keluarga, dan komunitas masing-masing peserta.

Program ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai lembaga. Wakil Ketua Umum MUI, K.H. M. Cholil Nafis, Ph.D., menyebut kegiatan tersebut sebagai langkah strategis membangun generasi yang kompetitif dan bermoral. "Saya atas nama MUI, mengapresiasi kegiatan Gen Halal Championship 2025. Dengan halal kita bisa memperbaiki generasi dan dunia," ungkapnya, sembari menegaskan bahwa konsep halal mencakup makanan, minuman, sumber kehidupan, hingga gaya hidup.

Apresiasi serupa disampaikan Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora sekaligus Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Ia menyatakan isu halal bukan lagi ranah pinggiran, melainkan agenda besar generasi masa kini. "Salah satu isu utama yang strategis adalah isu halal. Begitu

kita mampu concern terhadap urusan halal, berarti kita sudah masuk ke separuh urusan agama." Ia mengingatkan bahwa perintah halal dalam Al-Qur'an tertuju bagi seluruh umat manusia.

Untuk memperkuat wawasan peserta, digelar pula talkshow bertema "Membangun Ekosistem Halal Indonesia Bersama Generasi Berintegritas", menghadirkan Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc.; Dr. H. Aminudin Yakub, MA.; dan Sherly Annavita S.Sos., M.SiPh. Diskusi tersebut menegaskan bahwa peran generasi muda dalam membangun ekosistem halal tidak dapat ditawar: mereka adalah penerus yang akan mengawal industri halal lebih maju, modern, dan berkelanjutan.

Puncak kegiatan berlangsung pada 10 Januari 2026, saat tiga juara terbaik diumumkan. Alf Farrassayu Shannyn dari SMA Nuraida Islamic Boarding School, Jawa Barat, keluar sebagai Juara 1 dan membawa pulang Rp10.000.000. Rahmi Fitriyah dari SMAN 8 Jakarta meraih Juara 2 dengan hadiah Rp7.500.000. Sementara Juara 3 diraih oleh Achmad Farrell Budi Pratopo dari SMA Albanna Denpasar, Bali, yang memperoleh Rp5.000.000.

Lebih dari sekadar penobatan, kemenangan tersebut menjadi momentum bagi LPH LPPOM untuk mengukuhkan langkah melahirkan kader muda yang siap menjadi duta halal di sekolah dan masyarakat. Dengan keberhasilan menjaring hampir 1.500 peserta dan mengukuhkan 45 finalis unggulan, Gen Halal Championship kembali membuktikan dirinya sebagai gerakan literasi halal pelajar terbesar di Indonesia.

LPPOM berharap program ini terus tumbuh menjadi katalis yang memperkuat industri halal nasional. Kompetisi ini diharapkan mampu membangun generasi yang bukan sekadar memahami halal, tetapi menjadikannya bagian dari karakter dan gaya hidup. (***)



GENERASI MUDA, KUNCI INDONESIA JADI PUSAT EKONOMI HALAL DUNIA



Oleh:

Prof Khaswar Syamsu, PhD.
(Kepala Pusat Sains Halal IPB dan
Ketua Tenaga Ahli LPPOM)

Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat ekonomi halal dunia berkat populasi Muslim terbesar dan generasi muda yang kreatif serta melek digital. Meski masih dihadapkan pada tantangan literasi, inovasi, dan kolaborasi, peran generasi muda menjadi kunci untuk mendorong transformasi ekosistem halal agar lebih modern, berdaya saing, dan berdampak nyata bagi perekonomian nasional.

Indonesia kerap disebut sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Lebih dari sekadar fakta demografis, kondisi ini sejatinya adalah modal strategis yang sangat besar. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi halal global yang nilainya telah menembus triliunan dolar, Indonesia memiliki peluang emas untuk tampil bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai pemain utama dan pemimpin dunia.

Namun, potensi besar ini tidak serta-merta terwujud dengan sendirinya. Di balik peluang tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus diha-

dapi secara serius, mulai dari rendahnya literasi halal di masyarakat hingga keterbatasan inovasi. Di titik inilah peran generasi muda menjadi sangat krusial.

Ekosistem halal kini telah menjadi salah satu pilar penting dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa kebutuhan terhadap produk dan layanan halal terus mengalami peningkatan, baik di dalam maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri, permintaan produk halal tidak lagi terbatas pada makanan dan minuman.

Seiring meningkatnya pendapatan masyarakat serta kesadaran religius dan gaya hidup, produk halal memperluas berbagai sektor lain seperti kosmetik, farmasi, fashion, pariwisata, hingga keuangan. Halal tidak lagi dipahami sebatas simbol agama, melainkan telah bertransformasi menjadi standar kualitas, keamanan, dan etika yang diterima secara luas, bahkan oleh konsumen non-Muslim.

Tren global menunjukkan bahwa label halal kini identik dengan jaminan mutu. Produk halal dipersepsi sebagai produk yang diproses secara higienis, menggunakan bahan yang terjamin, serta melalui tahapan produksi yang transparan. Persepsi inilah yang membuat pasar halal global tumbuh begitu cepat dan menarik minat banyak negara, termasuk negara-negara non-Muslim, untuk ikut ambil bagian.

Bagi Indonesia, kondisi ini merupakan peluang ekonomi yang sangat besar. Jika dikelola dengan tepat, pengembangan ekosistem halal dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan nilai ekspor, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi dunia.

Selain itu, industri halal memiliki karakteristik rantai pasok yang panjang dan saling terhubung. Dari sektor hulu seperti pertanian dan peternakan, proses pengolahan di industri manufaktur, hingga sektor jasa seperti logistik, pariwisata, dan keuangan, semuanya terlibat dalam satu ekosistem yang utuh. Ketika ekosistem ini diperkuat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu sektor, tetapi menimbulkan efek berganda yang luas bagi perekonomian nasional. Lapangan kerja tercipta, usaha lokal tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Meski demikian, jalan menuju ekosistem halal yang kuat dan berdaya saing global tidaklah tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep halal itu sendiri. Bagi sebagian orang, halal masih dipersempit maknanya hanya pada aspek keharaman, seperti bebas dari babi dan alkohol.

Konsep halal sejatinya mencakup prinsip *halalan thayyiban*, yaitu tidak hanya halal secara syariat, tetapi juga baik, sehat, aman, dan berkualitas. Pemahaman yang lebih utuh mengenai pentingnya proses produksi, kebersihan, keterlacakkan bahan baku, serta manfaat produk halal secara holistik masih perlu terus diperkuat melalui edukasi yang berkelanjutan.

Tantangan lainnya adalah anggapan bahwa proses sertifikasi halal masih rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Birokrasi dan administrasi yang belum sepenuhnya dipahami sering kali menjadi penghambat



bagi produk lokal untuk naik kelas dan masuk ke pasar halal yang lebih luas.

Di sisi lain, inovasi produk dan layanan halal di Indonesia juga masih tergolong terbatas. Banyak produk halal yang beredar masih berkutat pada sektor makanan tradisional. Padahal, peluang inovasi terbuka lebar di berbagai bidang lain seperti kosmetik berbahan alami, produk vegan, pariwisata ramah Muslim, hingga teknologi finansial syariah.

Belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan juga menjadi tantangan tersendiri. Pengembangan ekosistem halal membutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah sebagai regulator, industri sebagai produsen, akademisi sebagai pusat riset dan inovasi, serta masyarakat sebagai konsumen. Tanpa kolaborasi yang kuat, berbagai kebijakan dan program berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan tidak mencapai hasil maksimal.

Di tengah kompleksitas tantangan tersebut, generasi muda Indonesia hadir sebagai harapan sekaligus kekuatan utama. Dengan karakter yang dinamis, kreatif, dan melek teknologi, generasi muda berada di posisi yang sangat strategis untuk menjadi motor penggerak transformasi ekosistem halal. Mereka bukan hanya penerus, tetapi agen perubahan yang mampu mengubah cara

pandang, pola konsumsi, dan arah pengembangan industri halal ke depan.

Generasi muda memiliki kemampuan untuk mengemas gaya hidup halal sebagai sesuatu yang modern, relevan, dan menarik. Melalui pendekatan kreatif, halal dapat diposisikan bukan sekadar kewajiban agama, tetapi sebagai pilihan gaya hidup yang sehat, etis, dan berkelanjutan. Di tangan generasi muda, halal bisa menjadi tren yang membanggakan, bukan sekadar label formal.

Selain itu, ide-ide segar yang dimiliki generasi muda membuka ruang besar bagi lahirnya inovasi produk dan layanan halal. Mereka dapat menjadi pelopor usaha rintisan di bidang halal skincare, modest fashion, kuliner halal kontemporer, hingga aplikasi perjalanan ramah Muslim. Penguasaan teknologi digital juga memungkinkan generasi muda untuk mendorong transformasi industri halal melalui platform e-commerce, aplikasi pendukung sertifikasi halal, serta pemanfaatan teknologi canggih seperti blockchain untuk menjamin keterlacakkan produk dari hulu ke hilir.

Peran generasi muda semakin kuat dengan kehadiran media sosial. Melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya, mereka mampu menjadi promotor gaya hidup halal yang efektif. Konten yang kreatif, edukatif, dan inspiratif dapat

menjangkau audiens yang luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat global. Dengan cara ini, nilai-nilai halal Indonesia dapat diperkenalkan ke dunia dengan pendekatan yang lebih segar dan mudah diterima.

Agar peran strategis generasi muda ini dapat dioptimalkan, diperlukan dukungan dan strategi keterlibatan yang terencana. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan berbasis halal menjadi langkah penting untuk membekali generasi muda dengan pemahaman bisnis sekaligus prinsip-prinsip industri halal.

Pengembangan startup halal melalui program inkubasi, akselerasi, dan akses pendanaan syariah juga perlu terus didorong. Di samping itu, kolaborasi antara generasi muda, pemerintah, dan industri harus diperkuat agar ide-ide inovatif dapat terwujud menjadi kebijakan dan produk nyata yang berdampak luas.

Keterlibatan aktif generasi muda dalam ekosistem halal akan membawa dampak positif yang signifikan. Daya saing produk lokal meningkat melalui inovasi dan branding yang kuat. Kepercayaan konsumen tumbuh seiring meningkatnya transparansi dan jaminan mutu. Industri halal berkembang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Pada akhirnya, generasi muda bukanlah sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama yang memegang peran strategis. Dengan energi, kreativitas, dan pengaruh yang dimiliki, mereka mampu menjadi arsitek utama dalam membangun ekosistem halal Indonesia yang kuat dan berdaya saing.

Tentu, tanggung jawab ini tidak bisa dipikul sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang solid dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan dan inovasi, visi Indonesia sebagai pusat halal dunia bukanlah sekadar mimpi, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan bersama. *InsyaaAllah.* (***)



TREN MODE FASHION MUSLIM 2026: MENGUSUNG KESOPANAN DAN KEANGGUNAN

Ramadan dan Idul Fitri 2026 (1447 H) diperkirakan akan diramaikan dengan berbagai mode terbaru yang berfokus pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, namun tetap sopan dan elegan.

Seperti halnya tren bisnis halal global pada umumnya, di sektor *fashion* (fesyen) muslim juga terjadi tren serupa: tetap berfokus pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Menurut Rhadeya Setiawan, *Chief of Scientific and Regulatory Affairs*, L'Oréal Indonesia, meningkatnya gaya hidup halal yang berfokus pada keberlanjutan tidak hanya mencakup makanan dan minuman, namun juga berbagai produk dan layanan, termasuk kosmetika, farmasi, fesyen, dan pariwisata.

Fenomena tersebut juga diakui oleh sejumlah pelaku usaha di bidang mode busana. Alben Ayub, desainer muda asal Surabaya, mengungkapkan bahwa arah baru dalam industri fesyen ini bukan sekadar pilihan estetika namun menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan alam. "Sekarang banyak desainer yang ingin menyelamatkan lingkungan dengan mengganti limbah *fashion*, limbah tekstil yang biasanya menggunakan bahan kimia, kini menggunakan bahan pewarna alami," ujar

Alben, seperti dikutip *detik.com*, Senin (21/7/2025).

Menurut Alben, tak hanya menggunakan bahan ramah lingkungan, tren fashion 2026 juga diprediksi akan semakin kuat memuat pesan sosial dan kampanye perubahan iklim lewat desain. "Maka dari itu kami punya tren fashion forecasting untuk 2026. Jadi kebanyakan menerjemahkan tentang alam, tentang sustainability. Tapi sebenarnya itu sama. Kami ingin menyelamatkan bumi," tambahnya.

“
Maka dari itu kami punya tren *fashion forecasting* untuk 2026. Jadi kebanyakan menerjemahkan tentang alam, tentang *sustainability*. Tapi sebenarnya itu sama. Kami ingin menyelamatkan bumi

ARAH MODE FASHION MUSLIM 2026

Ridho Jufri, Managing Director Klamby, seperti dikutip *mediaindonesia.com* menjelaskan bahwa saat ini industri busana muslim harus bergerak dinamis mengikuti minat konsumen yang tersebar di berbagai wilayah. Memasuki periode setelah musim Lebaran, arah fesyen diprediksi akan bergeser mengikuti karakteristik Generasi Z sebagai populasi terbesar di Indonesia.

Produk yang mengusung konsep ramah lingkungan dan mudah didaur ulang (recycling) diproyeksikan akan semakin digemari. Namun, Ridho mengakui bahwa tantangan besar masih membayangi produksi pakaian ramah lingkungan di dalam negeri. Masalah utamanya terletak pada biaya produksi yang masih sangat tinggi di Indonesia.

Khusus untuk tren mode fesyen muslim 2026, Tantiya Nimas Nuraini, editor *Liputan6.com*, dalam ulasannya menjelaskan, tren di tahun 2026

mengindikasikan pergeseran yang lebih dinamis. Dalam tren ini, kelembutan dan keberanahan berpadu secara harmonis, menciptakan tampilan yang kaya dan penuh makna.

"Pergeseran ini mencerminkan keinginan akan ekspresi diri yang lebih kaya, namun tetap mempertahankan esensi kesopanan dan keanggunan yang menjadi ciri khas fashion Muslim. Tren warna untuk tahun 2026 diperkirakan akan berpusat pada keseimbangan antara nuansa yang menenangkan dan warna-warna yang lebih berani, mencerminkan kebutuhan akan kenyamanan dan ekspresi diri," ujar Tantiya.

Oleh karena itu, Tantiya meyakini bahwa fashion Muslim 2026 akan menampilkan koleksi yang memadukan warna-warna pastel yang menenangkan dengan sentuhan warna cerah atau gelap yang kuat, menciptakan kontras yang menarik dan tampilan yang berkesan.

"Perpaduan tersebut tidak hanya tentang estetika visual, tetapi juga tentang narasi yang lebih dalam mengenai identitas dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan lingkungan. Konsumen semakin mencari pakaian yang tidak hanya indah tetapi juga memiliki makna, dengan warna yang dapat menyampaikan pesan tentang keberlanjutan, ketenangan, atau kekuatan," ujarnya. (***)





LABORATORIUM
LPPOM MUI
Advance Testing with Integrity



WHO ARE WE

LPPOM MUI Laboratory is the first halal and vegan laboratory in Indonesia that has been accredited with ISO 17025 and completed with the testing of hygiene, quality and safety of food, pharmaceutical and cosmetic products, and packaging.

WHY US

- ✓ Fast Track & Flash Track Testing Available
- ✓ Competitive Price
- ✓ Support QC dan RnD
- ✓ Open to Vendor Audit
- ✓ Online Service (Oligo-LS)
- ✓ Provide Sampling and Pick Up Sample

Elevate Your Beauty Brand

Ensure your products meet the highest quality and safety standards. Test with **LPPOM MUI Laboratory** and earn your customers' trust!



Halal Compliance



Vegan Claim and Certification



Quality and Safety Testing



QC/RnD Partnership Program

Contact Us

[https://linktr.ee/
lablppommui](https://linktr.ee/lablppommui)



@lab.lppommui



0817 878 286



lablppom.com



marketing.lab@halalmui.org

Cosmetics and Personal Care Laboratory Testing



Halal Compliance

Porcine DNA Testing |
Porcine Peptide Testing |
Wudhu Friendly Claim |
Etanol |
Animal-Free Verification Program



Quality & Safety Testing

- ✓ Microbiological Contamination **Based on PerBPOM No. 16/2024**
- ✓ Heavy Metal Contamination **Based on PerBPOM No. 16/2024**
- ✓ Chemical Contamination **Based on PerBPOM No. 16/2024**
- ✓ Impurities (Acrylamide, Hidrokuinon, Formaldehide, Dietilen Glikol, Etc)

- ✓ Active Ingredients (Niacinamide, Vitamin C, Retinoic Acid) Based on PerBPOM No. 3/2022
- ✓ Micro-Challange Test
- ✓ Antibacterial Test BS EN 1276
- ✓ SPF & PA (In Vitro) | SPF & PA (In Vivo) **Based on PerBPOM No. 3/2022**
- ✓ Anti-Acne **Based on PerBPOM No. 3/2022**
- ✓ Residual Solvent
- ✓ Stability Test
- ✓ Preservatives Test (Asam Salisilat, Na Benzoat, etc) **Based on PerBPOM 17 Tahun 2022**



Sanitation Hygiene

Swab Facility
Swab Personel
Microbiology Air Testing
Clean and Drinking Water
Testing Based on
Permenkes No.2/2023

The **Partnership Program** will help a cosmetics manufacturer to develop the testig method regarding the quality and safety parameter from raw materials



Molecular Laboratory
Microbiology Laboratory
Chemical Laboratory

QC and RnD Partnership Program



PETA JALAN KEHIDUPAN: TARGET YANG DITULIS, TAKDIR YANG DIMUDAHKAN

Banyak di antara kita melewati bulan, pekan, bahkan tahun tanpa arah yang jelas. Bekerja sekadarnya, menjalani hidup apa adanya, lalu heran mengapa tak ada yang berubah. Padahal, seperti kata Ust. Suhendi Alkhathab, hidup ini butuh peta jalan atau roadmap. Target yang ditulis bukan sekadar daftar harapan, tetapi ikhtiar yang membuka pintu takdir.

Pergantian tahun selalu datang dengan ritme yang sama: kalender berganti, resolusi baru mulai dibisikkan, tap jujur saja berapa banyak di antara kita yang benar-benar menyiapkan peta jalan hidup? Atau jangan-jangan tahun-tahun sebelumnya berlalu begitu saja, tanpa capaian berarti, tanpa evaluasi, tanpa jejak yang layak disebut progres?

Inilah yang dikhawatirkan Ustaz Suhendi Alkhathab, seorang pendakwah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pusat Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia (ADDI). "Kita menjalani hidup dengan 'semu', bergerak tapi tidak ke mana-mana, sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa baik dalam urusan dunia maupun akhirat," ungkapnya.

Beliau membuka dengan pertanyaan telak, "Kira-kira dalam hidup ini, apakah kita sudah punya roadmap?" Karena jika tidak, maka pergantian tahun hanya menjadi upacara rutin yang tidak punya makna. Padahal Allah sudah

mengingatkan dalam Al-Qur'an untuk melihat apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Muhasabah itu bukan ritual formal, tapi kebutuhan agar hidup tidak berjalan otomatis tanpa arah.

Roadmap hidup bukan sekadar catatan "ingin ini, ingin itu". Ia adalah pengingat bahwa hidup butuh arah, butuh target, butuh kesadaran akan peran kita di dunia. Sebagai hamba ('abd), kita bekerja, menikah, membesarkan anak, merawat orang tua semua itu ibadah. Dan sebagai *khalifah fil-ardh*, kita dituntut memberi manfaat. Maka meningkatkan kompetensi, belajar lagi, mengambil sertifikasi, bahkan kembali kuliah, semuanya menjadi bagian dari menjalankan amanah *khalifah*.

"Nabi Adam dimuliakan karena apa? Karena ilmu. Maka siapa pun yang merasa cukup dengan kondisi sekarang, yang merasa hidupnya sudah 'begini saja', perlu bertanya: apakah kita sudah benar-benar menjalani peran itu?" tegas Ustaz Suhendi mengingatkan.

Di sinilah pentingnya roadmap: ditulis, bukan hanya dipikirkan. Ustaz bercerita bahwa dulu beliau punya buku khusus untuk mencatat target-target hidupnya. Semuanya ditulis: rencana dakwah ke luar negeri, peningkatan kompetensi, dan hal-hal besar lainnya.

Dan yang menarik, beliau menegaskan, "Tidaklah semua yang saya tulis kecuali Allah mudahkan itu."

Ada pola yang jelas: target yang ditulis, diikutiarkan, dan didoakan, biasanya akan lebih mudah dijalankan. Karena ada energi fokus, ada kejelasan tujuan. Dan Allah pun memudahkan langkah-langkahnya.

Dalam konteks keluarga pun, roadmap hidup itu penting. Ustaz mengingatkan doa Surah Al-Furqan ayat 74 sebagai *blueprint* keluarga sakinah: "Rabbana hablana min azwjina wa dzurriyatina qurrata a'yun..." Keluarga adalah alasan banyak dari kita bekerja. Ustaz bertanya jenaka namun juru, "Bapak Ibu bekerja untuk siapa?" Jawabannya tentu: keluarga. "Maka roadmap kita pun harus menyentuh aspek itu perbaikan relasi, pendidikan anak, kesiapan finansial, bahkan kesehatan mental," terangnya.

Menariknya, Ustaz Suhendi mengaitkan roadmap dengan kesehatan mental. Menurut World Health Organization (WHO), mental yang sehat itu punya lima indikator: sejahtera, produktif, mampu mengelola stres, terhubung sosial, dan mampu mengambil keputusan. Banyak orang stres bukan karena masalahnya besar, tetapi karena dia tidak punya roadmap, sehingga keputusan-keputusan penting menggantung dan membuat hidup

terasa penuh beban. Ketidakmampuan mengambil keputusan membuat hidup mandek.

Karena itu, roadmap menjadi cara merapikan hidup. Ia memberi kita pegangan sehingga kita tidak mudah panik, tidak mudah hilang arah. Ia membuat kita mampu memilih, menimbang, dan akhirnya bertindak. Hidup yang terencana bukan berarti kaku, tapi sadar ke mana kaki ingin melangkah.

Ustaz juga mengingatkan tentang menjaga ucapan. Kadang hidup terasa berat bukan karena takdirnya memang rumit, tapi karena keluhan yang kita lepaskan terlalu banyak. Padahal Allah sudah menegaskan "Aku sebagaimana prasangka hamba-Ku." Maka jawaban sederhana ketika ditanya "Bagaimana kabarnya?" seharusnya mulai dilatih: "Alhamdulillah, baik, sehat, bahagia." Ini untuk mengondisikan jiwa terus positif, optimis, dan tenang. Karena ucapan adalah doa, dan doa memengaruhi arah hidup.

Pada akhirnya, roadmap hidup bukan hanya daftar target. Ia adalah muhasabah, niat, dan komitmen untuk berubah. Ia menuntun kita menjadi hamba yang lebih taat dan *khalifah* yang lebih bermanfaat. Ia membuat hari-hari yang kita jalani tidak lagi sia-sia, tapi terarah, bernilai, dan berdampak.

Hari baru selalu memberi kesempatan yang sama pada semua orang. Perbedaannya ada pada siapa yang menyusun peta jalan dan siapa yang membiarkan hidupnya berjalan tanpa arah.

Maka, seperti pesan Ustaz Suhendi, mari tulis target kita. Apa yang belum tercapai, apa yang ingin diraih, apa yang harus diperbaiki. Buat roadmap hidup. Karena target yang ditulis akan diikutiarkan, dan takdir yang diikhtiarakan InsyaAllah akan dimudahkan. (YN)

Menariknya, Ustaz Suhendi mengaitkan roadmap dengan kesehatan mental. Menurut World Health Organization (WHO), mental yang sehat itu punya lima indikator: sejahtera, produktif, mampu mengelola stres, terhubung sosial, dan mampu mengambil keputusan.



SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN: KEBUTUHAN ATAU SEKADAR TREN?

oleh : Fadila, Auditor Halal LPH LPPOM

Halal tak lagi hanya soal makanan. Kini, benda-benda yang kita gunakan sehari-hari pun ikut dipertanyakan kehalalannya. Apakah ini kebutuhan nyata atau sekadar tren? Di tengah meningkatnya kesadaran umat, pertanyaan itu semakin relevan.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada arus baru yang mulai ramai dibahas: sertifikasi halal untuk barang gunaan. Dari botol minum, alat masak, alat tulis, hingga pakaian dan aksesoris, semakin banyak produk non-pangan yang mulai masuk dalam radar kehalalan. Bagi sebagian orang, ini terasa sebagai terobosan penting. Namun tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah ini benar-benar kebutuhan umat atau sekadar fenomena “mengada-ada”?

Untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita kembali sejenak pada akar ajaran Islam terkait najis. Konsep kehalalan tidak terpisah dari upaya menghindari najis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fikih, para ulama membagi kategori najis menjadi tiga, masing-masing dengan perlakuan berbeda untuk membersihkannya.

Najis Ringan

Contoh paling populer adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Cara membersihkannya pun unik—cukup

diperceki air sebanyak tiga kali. Dalam proses industri, jenis najis ini hampir mustahil dijumpai sehingga jarang menjadi masalah.

Najis Berat

Air liur anjing, babi, serta turunannya masuk kategori ini. Cara pembersihan yang diwajibkan adalah membersihkan tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Dalam industri modern, penggunaan tanah tentu tidak praktis. Karena itu, para ulama memperbolehkan substitusi seperti sabun atau bahan pembersih tertentu, sementara air dapat digantikan media lain yang aman untuk mesin.

Mengapa hal ini penting? Karena pemanfaatan babi dan turunannya sangat luas—mulai dari gelatin, enzim, lemak, hingga komponen kimia yang bisa jadi hadir dalam proses produksi pelumas mesin, bahan plastik, pewarna tekstil, hingga lem sepatu. Artinya, kontaminasi najis berat bisa muncul di tempat-tempat yang tidak terduga.

Najis Sedang

Tersusuk di antaranya darah, bangkai, atau hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Pembersihannya sederhana: dicuci sampai hilang warna, rasa, dan bau. Jika kita bayangkan proses produksi dalam sebuah pabrik besar, potensi interaksi bahan-bahan seperti ini bukan sesuatu yang mustahil.

Dengan gambaran ini, menjadi lebih jelas bahwa kehalalan bukan sekadar soal apa yang kita makan. Bila makanan halal diletakkan dalam wadah yang terkontaminasi najis berat, maka makanan tersebut menjadi terpapar najis berat (mutanajis). Setiap yang mutanajis, maka statusnya pun menjadi haram. Maka wajar bila sertifikasi barang gunaan dipandang sebagai langkah preventif penting untuk menjaga rantai halal dari hulu ke hilir.

Di balik logo halal pada produk yang kita gunakan, ada proses panjang: penelusuran asal bahan, penge-

Selain memantapkan keyakinan konsumen, sertifikasi halal untuk barang gunaan juga menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha.

cekan bahan penolong, pengawasan tempat produksi, hingga penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Semuanya memastikan bahwa barang yang bersentuhan dengan tubuh dan makanan umat Islam bebas dari najis dan aman digunakan tanpa keraguan.

Selain memantapkan keyakinan konsumen, sertifikasi halal untuk barang gunaan juga menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha. Banyak produsen merasakan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pelanggan, daya saing produk, dan akses pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor. Namun, antusiasme ini juga menimbulkan situasi baru: semakin banyak pelaku industri ingin mendaftarkan berbagai kategori produk untuk disertifikasi.

Kemudian, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Agama No. 741 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Wajib Halal yang kemudian disempurnakan melalui KMA 944 Tahun 2024. Regulasi ini merinci kelompok barang gunaan yang wajib bersertifikat halal, seperti sandang, penutup kepala, aksesoris, peralatan rumah tangga, alat kesehatan, perlengkapan ibadah, alat tulis kantor, kemasan produk, dan bahan penyusun barang gunaan. Produk diluar kelompok tersebut, seperti kendaraan atau peralatan pertukangan, tidak diwajibkan selama tidak bersinggungan langsung dengan konsumsi umat.

Kejelasan batasan ini menjadi sinyal penting bagi industri sekaligus panduan bagi konsumen. Saat ini, kita tengah memasuki fase hitung mundur menuju salah satu tonggak besar

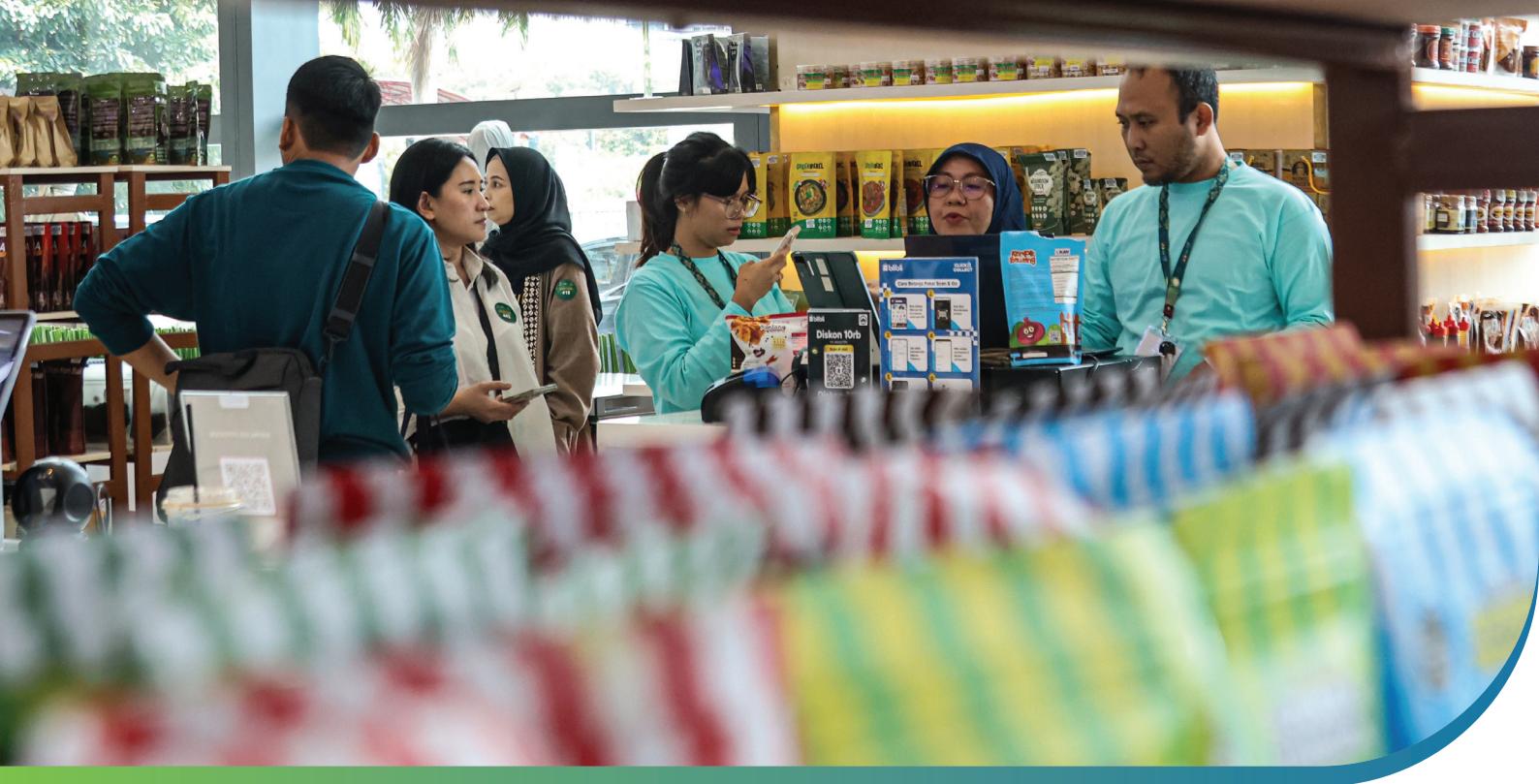
dalam implementasi jaminan produk halal di Indonesia. Pada 17 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi bagi barang gunaan akan berlaku secara penuh.

Pada tanggal yang sama, empat kategori lain juga mencapai batas waktu kewajibannya: kosmetik, obat, produk impor, dan produk UMKM. Artinya, dalam dua tahun ke depan, kesadaran dan persiapan pelaku industri akan sangat menentukan kelancaran implementasi kebijakan halal nasional.

Dalam perjalanan panjang menuju industri halal yang kuat dan menyeluruh, keberadaan lembaga pemeriksa halal seperti LPH LPPOM menjadi kunci pendampingan pelaku usaha. Dengan pengalaman lebih dari 37 tahun, LPPOM siap membantu menjembatani kebutuhan teknis, administratif, dan syariah agar produk barang gunaan benar-benar memenuhi kriteria halal sesuai regulasi.

Pada akhirnya, sertifikasi barang gunaan halal bukan sekadar tren atau sensasi. Ia tumbuh dari kebutuhan nyata umat Islam untuk menjaga kehalalan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memahami latar belakangnya, kita melihat bahwa kehalalan bukan sekadar apa yang masuk ke tubuh, tetapi juga apa yang menyentuhnya.

Dari sini, perjalanan halal di Indonesia tidak hanya berkembang ke arah yang lebih luas, tetapi juga lebih matang, rasional, dan bertanggung jawab—sebuah langkah penting agar umat benar-benar dapat hidup bersih, aman, dan tenteram dalam bingkai halal yang paripurna. (***)



MENUJU TATA KELOLA INDUSTRI BERKELANJUTAN: INTEGRASI HALAL, MUTU, DAN ETIKA

Oleh: Hendra Utama, Auditor Senior LPH LPPOM

Di tengah tuntutan pasar global yang makin kompleks, industri kini dinilai bukan hanya dari kualitas produk dan profit, tetapi juga komitmen pada etika, keberlanjutan, dan kehalalan. Dalam perubahan ini, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) tampil bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen strategis yang menyelaraskan standar global sekaligus memperkuat daya saing dan kepercayaan atas industri Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap industri global mengalami pergeseran besar yang tidak bisa diabaikan. Perusahaan tidak lagi dinilai hanya dari kemampuan menekan biaya dan mencetak keuntungan. Dunia usaha kini dituntut untuk buktikan hal yang jauh lebih fundamental: integritas dalam menjalankan praktik bisnis, kepatuhan terhadap standar mutu, komitmen terhadap etika, perlindungan terhadap konsumen, serta kontribusi terhadap keberlanjutan bumi dan masyarakat.

Bagi Indonesia, tuntutan itu memiliki satu dimensi tambahan yang sangat khas: kehalalan. Dan di sinilah posisi strategis Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menemukan panggungnya.

Selama ini, SJPH sering dipersepsi sebagai kewajiban administratif—setumpuk dokumen, daftar bahan, dan audit

berkala. Padahal, jika dilihat lebih luas, SJPH adalah kunci masuk menuju tata kelola industri masa depan. Ia sejajar dengan standar internasional seperti ISO, sejalan dengan kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG), dan terkoneksi dengan agenda besar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Halal bukan sekadar label religius, tetapi fondasi bagi reputasi, daya saing, dan kepercayaan global.

DARI KEPATUHAN TERSEBAR MENUJU KONVERGENSI NILAI

Dunia hari ini penuh paradoks. Politik internasional semakin terpolarisasi, perdagangan dipenuhi proteksionisme, dan identitas nasional menguat. Namun justru di tengah fragmentasi itu, industri berjalan ke arah sebaliknya: standardisasi dan penyatuan nilai.

Perusahaan multinasional tidak cukup hanya mematuhi satu aturan lokal. Mereka harus bergerak lincah dalam jaringan regulasi yang berlapis—mutu, keamanan, lingkungan, sosial, dan kini halal. Standar dan sertifikasi menjadi bahasa pemersatu yang membuat produk bisa diterima di banyak negara.

Masalahnya, di Indonesia regulasi kerap dipandang sebagai hambatan. Banyak pelaku usaha merasa “dipagari” aturan, bukan didukung olehnya. Padahal, standar hadir bukan untuk membebani pelaku industri, melainkan untuk menutup kesenjangan informasi dan meningkatkan kepercayaan. Bagi konsumen, standar memberi jaminan; bagi produsen, standar membangun legitimasi.

Dengan cara pandang seperti itu, memecah kepatuhan ke dalam kotak-kotak terpisah—mutu di satu sisi, halal di sisi lain, lingkungan di tempat berbeda—justru menimbulkan inefisiensi. Sistem yang bekerja sendiri-sendiri membuat biaya naik, data saling tidak terhubung, dan organisasi rentan inkonsistensi.



sistensi. Integrasi adalah jawabannya. Bukan sebagai proyek teknis, tetapi sebagai transformasi tata kelola industri.

STANDAR SEBAGAI PILAR TATA KELOLA MODERN

Jika ditelusuri, SJPH memiliki arsitektur yang sangat mirip dengan sistem manajemen mutakhir dunia. Ia mewajibkan organisasi menetapkan kebijakan, menetapkan penanggung jawab, mengelola bahan, menelusuri proses, melaksanakan audit, dan menjalankan perbaikan berkelanjutan. Itu adalah elemen inti dari *good corporate governance*: akuntabilitas, transparansi, dan integritas.

Sama seperti ISO 9001 atau 22000 yang berkembang dari kebutuhan pasar global, SJPH juga tumbuh dari tuntutan masyarakat—khususnya masyarakat muslim—atas jaminan keamanan, mutu, dan kehalalan pangan. Artinya, menempatkan SJPH di luar sistem lain adalah kesalahan konseptual. Ia merupakan bagian integral dari struktur tata kelola perusahaan.

MENGHINDARI INTEGRASI SEMU

Belakangan banyak perusahaan menyatakan telah memiliki “integrated management system”. Namun praktiknya sering berhenti pada penggabungan binder atau menyusun matriks perbandingan persyaratan. Praktek semacam itu mungkin terlihat seakan sudah “terintegrasi”, namun bisa jadi lebih banyak porsinya pada pengajaran aspek dokumentasi.

Integrasi sejati terjadi ketika nilai halal, mutu, etika, keselamatan, dan lingkungan menyatu dalam cara organisasi mengambil keputusan setiap hari. KPI saling mendukung, kebijakan tidak tumpang tindih, audit mengungkap insight strategis, dan karyawan benar-benar memahami tujuan sistem, bukan sekadar mengikuti prosedur. Dengan kata lain, integrasi bukan menyamakan dokumen—melainkan menyatukan arah, budaya, dan logika kerja.

PENDEKATAN TEKNOKRATIS: SISTEM SEBAGAI MESIN KEPUTUSAN



Untuk melangkah lebih jauh, sistem manajemen harus dipandang sebagai sarana, bukan tujuan. Transparansi rantai pasok, penilaian risiko, pemilihan pemasok, audit internal, hingga tinjauan manajemen adalah ruang di mana integrasi menjadi nyata.

Misalnya, manajemen risiko terintegrasi dapat menilai sekaligus tiga ancaman: risiko bahan tidak halal, risiko mutu buruk, dan dampak lingkungan. Evaluasi pemasok dapat mencakup status sertifikasi halal, kepatuhan keamanan pangan, serta rekam jejak keberlanjutan. Audit internal bukan Audit internal bukan sekedar daftar ketidaksesuaian, namun menjadi dasar untuk perbaikan dalam implementasi sistem pada satu siklus berikutnya.

Hasil seluruh proses itu menjadi dasar pengambilan keputusan yang berdampak: menentukan pemasok alternatif, mengubah formula bahan baku, hingga memutuskan investasi perbaikan proses.

HALAL DALAM PERSPEKTIF RANTAI NILAI GLOBAL

Ketika pasar dunia semakin kompetitif, masuk ke rantai pasok bernilai tambah

tinggi menjadi tantangan sekaligus peluang. SJPH yang berjalan baik dapat menjadi tiket masuk industri Indonesia ke pasar internasional—dari Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, hingga Eropa.

Halal bukan hanya label sertifikasi—ia adalah reputasi. Ia menunjukkan kedisiplinan proses, profesionalitas pengelolaan, dan komitmen terhadap konsumen. Ketika dipadukan dengan standar mutu internasional, perusahaan Indonesia tidak lagi berdiri sebagai pemasok kelas dua, melainkan mitra strategis global.

HALAL SEBAGAI JEMBATAN ESG DAN SDGS

Dalam wacana ESG, SJPH memiliki kesesuaian logis. Pada aspek Go-

vernance, ia menyediakan struktur pengendalian. Pada aspek Social, ia melindungi hak dan keyakinan konsumen. Pada aspek Environmental, integrasinya memaksa perusahaan lebih hemat, bersih, dan bertanggung jawab. Jika diselaraskan dengan SDGs, kontribusinya dapat dilacak jelas: ke-sehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, konsumsi bertanggung jawab, hingga kemitraan rantai pasok global. Dengan demikian, SJPH yang sudah terintegrasi dengan sistem lain tersebut bisa menjadi fondasi untuk membangun kinerja keberlanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk merealisasikan manfaat integrasi, pemerintah dan industri harus bergerak bersama. Pemerintah perlu menyusun pedoman integrasi, meningkatkan kapasitas lembaga audit, dan memberi insentif bagi perusahaan yang mengadopsinya. Pelaku usaha harus berani mengambil langkah top-down: menempatkan SJPH dan mutu di inti strategi, bukan di pinggiran operasional.

Pada akhirnya, pendekatan terintegrasi ini membuka jalan menuju industri Indonesia yang lebih tangguh, dipercaya, dan berdaya saing. Di masa depan, kehalalan dan keberlanjutan bukan lagi pembeda—melainkan syarat minimum. Indonesia memiliki kesempatan untuk tidak hanya memenuhi standar global, tetapi ikut membentuknya. (***)

“ Halal bukan hanya label sertifikasi—ia adalah reputasi. Ia menunjukkan kedisiplinan proses, profesionalitas pengelolaan, dan komitmen terhadap konsumen.”



PENGENALAN SERTIFIKASI HALAL



GRATIS

Join Our
Interactive Discussion

Membahas Informasi Mengenai Sertifikasi Halal:
Regulasi | Alur proses | Dokumen & Persyaratan | Manfaat | Kontak Stakeholder

SELASA
Minggu
2 & 4
TIAP BULAN

MULAI
09.00
WIB



Daftarkan via:
<https://s.id/psh-idn>

LIMITED SEAT



PEMIKIRAN DAN KEPELOPORAN PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN: DARI EKONOMI SYARIAH HINGGA SISTEM SERTIFIKASI HALAL

Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin tidak hanya dikenal sebagai ulama kharismatik dan tokoh sentral di bidang ekonomi syariah Indonesia, tapi juga diakui sebagai figur penting dalam pengembangan standar sertifikasi halal di tatanan global.

Sebagai ulama intelektual yang memberi perhatian besar di bidang ekonomi syariah, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin aktif mengadvokasi ekonomi syariah sebagai konsep inklusif yang berkeadilan. Beliau menekankan, konsep ekonomi syariah harus menjadi pendorong untuk mengatasi masalah global seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Adapun di bidang produk halal, K.H. Ma'ruf Amin senantiasa mendorong peran aktif Indonesia untuk menjadi pusat perdagangan halal dunia. Beliau juga memiliki andil besar dalam merumuskan konsep sistemjaminan halal serta mengawal terbitnya fatwa halal.

Sebagai penghargaan atas peran dan karya besarnya bagi bangsa dan negara. K.H. Ma'ruf Amin memperoleh gelar Doktor Kehormatan *Honoris Causa* dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tanggal 5 Mei 2012. Selain itu, Beliau juga pernah mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 65/TK/2014, di Jakarta, pada tanggal 11 Agustus 2014.

ULAMA KHARISMATIK KETURUNAN NAWAWI AL BANTANI

Lahir pada tanggal 11 Maret 1943, bertepatan pada tanggal 4 Rabiulawal 1362 Hijriyah di Desa Kresek, Tangrang, dari pasangan Kyai Haji Mohamad Amin dan Hajah Maimoenah, Ma'ruf Amin memang terlahir dari keluarga yang sangat religius. Beliau masih memiliki garis keturunan dari Syekh Nawawi al-Bantani, ulama asal Banten, keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama yang memiliki nasab sampai kepada Nabi Muhammad saw.

Ma'ruf Amin memulai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah di

Tangerang yang diselesaikan pada tahun 1955. Kemudian meneruskan pendidikannya di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur sampai 1961. Pendidikan formalnya adalah Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun Bogor, pada tahun 1967.

Perjalanan karir K.H. Ma'ruf Amin sangat beragam dan kaya warna. Beliau tidak hanya sebagai ulama, namun juga politisi, akademisi, praktisi hingga birokrat. Di bidang politik, pasca reformasi di Indonesia pada tahun 1998 K.H. Ma'ruf Amin menjabat sebagai penasehat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Beliau juga pernah duduk di kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada periode 1997-1999 yang terpilih di Fraksi Utusan Golongan. Beliau juga menjabat sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Kabupaten Tangerang, kemudian sebagai Ketua Komisi VI DPR RI hingga 2001.

Sebagai ulama, K.H. Ma'ruf Amin sudah aktif menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pengurus di Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), hingga menjadi Ketua Dewan Syariah Nasional dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat tahun 1996. Hingga akhirnya menjadi Ketua Umum MUI (2015-2020) serta sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI (2020-2025 dan 2025-2030)

KEPELOPORAN DI BIDANG EKONOMI SYARIAH

Menurut K.H. Ma'ruf Amin, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi inklusif, tidak hanya untuk Muslim, tapi untuk semua kalangan. Sistem tersebut dijalankan dengan berbasis keadilan dan menghindari riba. Di Indonesia, ekonomi syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam memperkuat ekonomi nasional melalui pengembangan industri halal, keuangan syariah, dana sosial

Di Indonesia, ekonomi syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam memperkuat ekonomi nasional melalui pengembangan industri halal, keuangan syariah, dana sosial (ziswaf), dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

sosial (ziswaf), dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Oleh karena itu, menurut K.H. Ma'ruf Amin, sistem ekonomi syariah harus didukung dengan regulasi yang memadai serta diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional agar menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip bagi hasil yang adil dan pengembangan ekosistem dari bawah (*bottom-up*), yang merupakan prinsip dasar ekonomi syariah, dapat menciptakan kemaslahatan umat, menjadikan Indonesia pemimpin ekonomi syariah global.

Kepeloporan K.H. Ma'ruf Amin di ekonomi syariah semakin terlihat ketika beliau bersama tokoh Islam lainnya, mempelopori diselenggarakannya lokakarya MUI tahun 1990, yang menjadi pendorong lahirnya Bank Muamalat. Inilah bank syariah pertama di Indonesia yang lahir jauh sebelum adanya undang-undang perbankan syariah.

Perjuangan itu terus berlanjut hingga K.H. Ma'ruf Amin menjabat Ketua Umum MUI. ketika menggantikan Prof. Dr. Din Syamsudin. Sebelum akhirnya menjabat sebagai Wakil Presiden RI. menggantikan Prof. Dr. Din Syamsudin. Sebagai Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin mendorong terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), yang dikuatkan oleh Peraturan Presiden

Nomor 91 Tahun 2016 pada tanggal 8 November 2016.

Selanjutnya, ketika K.H. Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden (2019-2024) pemerintah melakukan perubahan KNKS menjadi KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), dimana K.H. Ma'ruf Amin menjabat sebagai ketua harian.

Perluasan cakupan KNKS menjadi KNEKS dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan untuk pengembangan ekonomi syariah di berbagai daerah, pemerintah juga membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) pada tahun 2020 dan terus mendorong pengembangan sektor syariah agar menjadi solusi pembiayaan pembangunan nasional sekaligus menguatkan gerakan ekonomi syariah di daerah

Dalam wawancara khusus dengan *Jurnal Halal*, beberapa waktu lalu, K.H. Ma'ruf Amin menegaskan, pengembangan ekonomi syariah difokuskan pada empat bidang, yakni industri keuangan syariah, industri halal, kegiatan sosial islam seperti zakat, infaq dan shadaqah, serta usaha dan pengusaha syariah.

"Agar semua ini dapat berjalan, maka secara kelembagaan saya membentuk Komite Nasional Ekonomi dan

Keuangan Syariah (KNEKS), yang diketuai oleh presiden, sedangkan wakil presiden sebagai wakil ketua sekaligus ketua harian," ujarnya.

Ma'ruf Amin mengakui, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun, berbagai capaian yang telah diraih juga sangat membanggakan. Di industri keuangan syariah, misalnya, dulu Indonesia masih tertinggal. Namun saat ini sudah berada di peringkat tiga. "Untuk produk halal kita juga sudah punya posisi, bahkan di wisata halal kita nomor satu," kata KH Ma'ruf Amin.



TOKOH SENTRAL DI BIDANG HALAL

Sebagai negara dengan penduduk muslim sangat besar, mencapai lebih dari 250 juta, menurut Ma'ruf Amin, Indonesia sejatinya memiliki potensi yang besar di bidang halal. Namun potensi tersebut belum digarap secara maksimal, sehingga Indonesia belum menjadi produsen halal yang besar. Sementara negara lain yang bukan mayoritas muslim seperti Brasil, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan China, justru menjadi produsen halal yang produksinya beredar di negara-negara muslim.

Oleh karena itu, potensi Indonesia harus digerakkan untuk menjadi produsen halal di dunia. "Kita memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, kita juga

sudah menjadi pemberi stempel halal terbesar di dunia. Ini yang harus kita gerakkan bersama-sama," katanya.

Ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia seperti menemukan jalan ketika K.H. Ma'ruf Amin ditunjuk sebagai Wakil Presiden (2019-2024). Berbarengan dengan pengembangan ekonomi syariah nasional, beliau terus mendorong penguatan ekosistem halal Indonesia secara komprehensif dari hulu ke hilir. K.H. Ma'ruf Amin menekankan pentingnya peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang tersebar di daerah untuk mendukung sistem jaminan produk halal yang efektif, serta memberikan pelayanan pemeriksaan halal yang cepat dan profesional.

Perhatian K.H. Ma'ruf Amin terhadap layanan pemeriksaan halal sejatinya sudah ditunjukkan sejak beliau aktif di MUI, baik sebagai Ketua Komisi Fatwa maupun sebagai Ketua Umum MUI. Untuk memberikan standar pelayanan, beliau secara aktif memperjuangkan agar sertifikasi halal MUI menjadi standar yang diakui secara global. Perjuangan ini berlangsung selama puluhan tahun dan kini standar halal Indonesia telah diikuti oleh beberapa negara lain.

Adapun untuk kalangan pelaku usaha, K.H. Ma'ruf Amin memfasilitasi pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, KIH juga harus memperoleh fasilitas seperti halnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga menarik bagi para investor.

K.H. Ma'ruf Amin mengaku sangat optimis, ke depan ekonomi syariah dan produk halal di Indonesia akan terus berkembang. "Semua bermula dari nol. Kita dulu mengawalinya dari nol hingga hasilnya seperti sekarang. Dari yang belum ada saja kita bisa adakan, kenapa sesuatu yang sudah ada ini tidak bisa kita tingkatkan?", ujarnya dengan nada optimis. (FM)

K.H. Ma'ruf Amin menekankan pentingnya peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang tersebar di daerah untuk mendukung sistem jaminan produk halal yang efektif, serta memberikan pelayanan pemeriksaan halal yang cepat dan profesional.



HALAL MENJADI JEMBATAN KESEJAHTERAAN DI UJUNG NEGERI

Di Krayan, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, halal bukan sekadar standar, melainkan kunci akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengabdian LPPOM Kalimantan Utara, keadilan dihadirkan hingga ke titik terluar negeri.

Di peta Indonesia, Krayan mungkin hanya terlihat sebagai titik kecil di sudut paling utara Kalimantan. Namun bagi mereka yang pernah menapakkan kaki di sana, Krayan menjadi kisah tentang keteguhan, keterbatasan, dan harapan yang terus dijaga. Kecamatan terluar di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ini berba-

tasan langsung dengan Malaysia dan berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut.

Alamnya memukau, udaranya sejuk, tetapi medan menuju ke sana tidak pernah mudah. Dari Tarakan, perjalanan harus ditempuh melalui jalur laut, udara, dan darat, sebuah rute panjang yang menguras tenaga dan kesabaran. Di wilayah yang sunyi dan jauh dari pusat-pusat

layanan inilah, pengabdian menemukan maknanya yang paling jujur.

Dua auditor Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Kalimantan Utara, drh. Sukamto dan Ir. Solikhatin, telah menyelesaikan tugasnya. Mereka mengaudit pelaku usaha di Krayan Induk, Krayan Tengah, Krayan Selatan, hingga Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikat halal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal). Perjalanan panjang tersebut berbuah hasil: proses audit dinyatakan lolos di Komisi Fatwa, menjadi bagian penting dari tahapan penerbitan sertifikat halal sesuai regulasi nasional.

Capaian ini mungkin tampak administratif di atas kertas. Namun di lapangan, ia adalah hasil dari kerja panjang yang penuh perjuangan, dedikasi, dan keikhlasan. Setiap langkah audit bukan sekadar memastikan kepatuhan standar halal, tetapi juga

membuka pintu akses ekonomi bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Krayan memiliki wajah sosial yang khas. Sekitar 90 persen penduduknya adalah nonmuslim, mayoritas berasal dari Suku Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Krayan sangat bergantung pada Malaysia. Bahkan, sekitar 70 persen kebutuhan pokok dipenuhi dari negara tetangga. Kedekatan geografis membuat perdagangan lintas batas menjadi nadi kehidupan. Namun ada satu syarat penting yang tidak bisa dihindari: Malaysia mensyaratkan sertifikat halal bagi produk yang masuk dan diperdagangkan.

Di titik inilah, sertifikat halal BPJPH menjadi lebih dari sekadar dokumen kepatuhan. Ia menjelma sebagai pintu akses ekonomi, penentu daya saing, sekaligus jembatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

TANTANGAN DAN PENGABDIAN

Direktur LPPOM Kalimantan Utara, Elang Buana, menegaskan bahwa kehadiran LPPOM di Krayan bukan semata menjalankan tugas kelembagaan, melainkan panggilan nurani. "Kami

hadir di Krayan bukan hanya untuk bicara soal halal sebagai standar, tetapi sebagai jalan keadilan. Sertifikat halal BPJPH adalah instrumen agar masyarakat perbatasan memiliki kesempatan yang sama untuk sejahtera," ujarnya.

Menurut Elang, tantangan medan dan tingginya biaya tidak pernah menjadi alasan untuk mundur. Seluruh biaya akomodasi dan transportasi selama proses audit memang ditanggung oleh LPPOM. Namun baginya, nilai pengabdian jauh lebih besar daripada hitung-hitungan materi. "Medannya berat, jaraknya jauh, dan biayanya tidak kecil. Tapi ketika sertifikat halal menjadi kunci kesejahteraan masyarakat, maka relah itu harus dituntaskan," tuturnya.

Lebih jauh, Elang menekankan bahwa sertifikasi halal di Krayan tidak dibangun dengan sekat identitas. "Krayan adalah wilayah dengan mayoritas non-muslim. Tapi halal adalah jembatan. Sertifikat halal BPJPH membuka akses pasar, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga martabat masyarakat tanpa melihat latar belakang agama," katanya.

Di Krayan, halal menjelma menjadi bahasa universal. Ia menyatakan kepentingan ekonomi, tuntutan pasar lintas negara, dan nilai kemanusiaan. Kehadiran auditor LPPOM bukan ha-

nya membawa dokumen dan standar, tetapi juga pesan bahwa Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) negara hadir hingga ke batas terluar Indonesia.

Di tengah keterbatasan fasilitas dan tantangan alam, semangat pengabdian menemukan bentuknya yang paling nyata. Langkah demi langkah ditempuh agar pelaku usaha kecil di Krayan dapat berdiri sejar, memiliki akses pasar yang lebih luas, dan meraih kehidupan yang lebih layak melalui sertifikat halal BPJPH.

Menutup kisah perjuangan ini, Elang Buana menyampaikan harapan yang sederhana namun penuh makna, "Yang terpenting bagi kami, bendera LPPOM harus tetap berkibar tegak di Krayan. Karena dari sanalah kami memastikan sertifikat halal benar-benar menjadi jembatan keadilan dan kesejahteraan sampai ke ujung negeri," pungkasnya.

Di antara bukit, perbatasan, dan sunyi yang panjang, Krayan menjadi saksi bahwa pengabdian tidak mengehal jarak. Bahwa halal bukan sekadar label, melainkan jalan menuju keadilan. Dan bahwa kepedulian, ketika diajarkan dengan tulus, mampu menembus batas apa pun. (***)

Krayan memiliki wajah sosial yang khas. Sekitar 90 persen penduduknya adalah nonmuslim, mayoritas berasal dari Suku Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Krayan sangat bergantung pada Malaysia. Bahkan, sekitar 70 persen kebutuhan pokok dipenuhi dari negara tetangga.



LPPOM MERAIH APRESIASI MITRA USAHA MIKRO KEMENTERIAN UMKM

LPPOM menjadi satu-satunya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang menerima apresiasi sebagai mitra usaha mikro dari Kementerian UMKM. Pengakuan ini menegaskan peran LPPOM dalam memperkuat daya saing UMKM melalui pemeriksaan dan pendampingan halal.

Komitmen dalam mendukung penguanan dan pemberdayaan usaha mikro kembali mendapatkan pengakuan dari negara. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan apresiasi kepada para mitra strategis usaha mikro dari berbagai daerah di Indonesia yang dinilai konsisten berkontribusi nyata dalam membangun fondasi ekonomi nasional. Apresiasi tersebut diselenggarakan pada 17 Desember 2025 di Menara Peninsula Hotel, Jakarta.

Di antara para penerima apresiasi, LPPOM menorehkan pencapaian penting sebagai satu-satunya Lembaga Pe-

meriksa Halal (LPH) yang menerima apresiasi dari Kementerian UMKM sebagai mitra strategis usaha mikro. Pengakuan ini menegaskan peran LPPOM yang melampaui fungsi pemeriksaan kehalalan semata, yakni sebagai mitra pendamping UMKM dalam meningkatkan kualitas produk, kepatuhan regulasi, serta daya saing usaha secara berkelanjutan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa apresiasi ini merupakan bentuk legitimasi dan validasi atas komitmen nyata berbagai pihak yang secara konsisten mendukung pemberdayaan pengusaha mikro. Menurutnya, pengusaha mikro merupakan

fondasi penting perekonomian nasional yang harus terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

"Ini adalah cara kami menyampaikan secara tegas bahwa negara melihat kontribusi berbagai pihak, negara menghargainya, dan negara berterima kasih," ujar Menteri Maman dalam sambutannya.

Sebagai lembaga pemeriksa halal, LPPOM memiliki peran strategis dalam memastikan produk UMKM memenuhi standar kehalalan yang diakui. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan konsumen

sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Melalui proses pemeriksaan yang kredibel dan pendampingan yang berkelanjutan, LPPOM mendorong UMKM agar mampu memenuhi standar tersebut tanpa kehilangan karakter dan kearifan lokal produknya.

Apresiasi dari Kementerian UMKM ini sekaligus menjadi pengakuan atas konsistensi LPPOM dalam mendukung UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil, agar mampu naik kelas. Tidak hanya memastikan aspek kehalalan produk, LPPOM juga berperan dalam edukasi pelaku usaha terkait pentingnya sistem jaminan produk halal sebagai bagian dari tata kelola usaha yang baik.

Ke depan, Menteri Maman mengajak seluruh mitra strategis, khususnya dari kalangan usaha menengah dan besar, untuk terus memperkuat kemitraan dalam rantai pasok yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Kolaborasi yang solid dinilai menjadi

kunci dalam menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berdaya saing. "Kita semua harus saling menguatkan, saling menguntungkan, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Menteri Maman juga menilai capaian ini sebagai hasil kerja bersama dan bukti semakin kuatnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan dan penjaminan, asosiasi, hingga perguruan tinggi. Bahkan, dalam proses penjurian penerima apresiasi, Kementerian UMKM melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan objektivitas. "Kolaborasi adalah kunci keberhasilan kita bersama dalam mengelola dan memperkuat UMKM," ujarnya.

Meski demikian, tantangan dalam pemberdayaan usaha mikro masih perlu menjadi perhatian bersama. Menteri

Maman menyoroti persoalan literasi keuangan dan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih dihadapi oleh banyak pengusaha mikro. Ia berharap ke depan sinergi antar pemangku kepentingan dapat semakin diperkuat untuk meningkatkan pemahaman keuangan pelaku usaha sekaligus memastikan akses pembiayaan yang lebih inklusif.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menyampaikan bahwa hingga akhir 2025, lebih dari 27 ribu usaha mikro telah menjalin kemitraan dengan usaha kecil, menengah, hingga besar. Kemitraan ini menjadi indikator penting keberhasilan program pemberdayaan UMKM yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas usaha. "Kemitraan ini mendorong pengusaha mikro naik kelas, yang ditandai dengan peningkatan modal usaha, produktivitas, serta perluasan jaringan kemitraan," ujar Riza. (***)



LPPOM KIRIM 100 TANGKI AIR BERSIH UNTUK KORBAN BENCANA SUMATERA

LPPOM menyalurkan 100 tangki air bersih ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat pada masa tanggap darurat.

Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kerusakan infrastruktur, termasuk sarana air bersih, menyebabkan warga di sejumlah wilayah harus menghadapi keterbatasan dalam memenuhi

Bagi LPPOM, komitmen menjaga kualitas dan nilai halal berjalan seiring dengan kepedulian terhadap aspek kemanusiaan. Kehadiran dalam aksi sosial ini menjadi bagian dari upaya LPPOM untuk berkontribusi secara nyata.

kebutuhan dasar sehari-hari. Kondisi tersebut dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari keluarga yang kehilangan tempat tinggal hingga anak-anak yang harus beradaptasi dengan situasi darurat.

Dalam situasi pascabencana, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama. Rusaknya jaringan distribusi air membuat akses air bersih tidak mudah diperoleh, padahal air sangat dibutuhkan untuk keperluan konsumsi, sanitasi, dan menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan awal di wilayah terdampak.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial, LPPOM turut mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Sumatera. Bantuan yang diberikan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai salah satu kebutuhan paling mendesak di masa tanggap darurat.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam penyaluran 100 tangki air bersih dengan kapasitas masing-masing 5.000 hingga 6.000 liter. Tangki-tangki

air tersebut disalurkan ke berbagai titik terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang selama beberapa waktu mengalami keterbatasan akses air bersih.

Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari kepedulian bersama seluruh insan LPPOM terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana. "Seratus tangki air ini bukan sekadar angka. Bantuan ini lahir dari empati dan kepedulian seluruh Insan LPPOM. Kami berharap setiap tetes air yang disalurkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat serta memberikan dukungan di tengah masa pemulihan," ujar Muti Arintawati.

Pihaknya menambahkan bahwa kepedulian sosial merupakan nilai yang terus dijaga LPPOM dalam menjalankan perannya. "Bagi kami, kepedulian sosial bukanlah respons sesaat, melainkan nilai yang hidup dalam keseharian Insan LPPOM. Ketika saudara-saudara kita tertimpa musibah, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk hadir, berbagi, dan saling menguatkan," ungkapnya.

Selain disalurkan kepada masyarakat umum, bantuan juga diberikan kepada keluarga besar insan LPPOM yang turut terdampak bencana. Langkah ini mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas internal, sekaligus memastikan bahwa dukungan diberikan secara menyeluruh.

Bagi LPPOM, komitmen menjaga kualitas dan nilai halal berjalan seiring dengan kepedulian terhadap aspek kemanusiaan. Kehadiran dalam aksi sosial ini menjadi bagian dari upaya LPPOM untuk berkontribusi secara nyata, terutama pada saat masyarakat berada dalam kondisi rentan akibat bencana.

Melalui penyaluran 100 tangki air bersih ini, LPPOM berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak serta mendukung proses pemulihan pascabencana. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatera yang tengah berupaya bangkit dan melanjutkan kehidupan sehari-hari. (***)



PT. AMANAH PRIMA ABADI

OUR SERVICE:



Printing & Publishing



IT Support



General Trading

CONTACT US:

- 📞 0251 - 8395616
- 📞 08128513480
- ✉️ info@amanahprimaabadi.co.id
- ✉️ amanahprimaabadi@gmail.com
- 🌐 www.amanahprimaabadi.co.id

Supporting Partner



JurnalHalal
HALAL IS MY LIFE